

Naskah Sumber Arsip Pendidikan



anri

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NASKAH SUMBER ARSIP PENDIDIKAN

Ketua

Agus Santoso

Editor

Senja Kala Yahya

Anggota

Abdul Cholik
Bayu Patriasari
Desi Mulyaningsih
R. Suryagung SP.
Sapta Sunjaya

Desain Grafis & Lay Out

Beny Oktavianto

Copyright @ARSIP NASIONAL RI – PA 2015
UU No.43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

KATA PENGANTAR

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan nasional. Penyelenggaraan kearsipan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya (pasal 3 h).

ANRI menyajikan berbagai sumber informasi berbasis arsip, arsip statis yang mempunyai nilai guna informasi bagi publik. Khasanah arsip tentang Pendidikan yang tersimpan di ANRI tidak saja sebagai bahan bukti penyelenggaraan kehidupan berbangsa yang tercipta pada masa lampau, tetapi memiliki makna lintas waktu, lintas peristiwa dan lintas geografi. Arsip sebagai sumber ingatan mempertebal identitas bangsa yang pada gilirannya menjadi simpul pemersatu bangsa.

Penerbitan **Naskah Sumber Arsip Pendidikan** merupakan upaya ANRI dalam membuka akses seluas-luasnya bagi publik untuk mempelajari berbagai aspek kehidupan dan keilmuan dalam perspektif kemaritiman. Arsip sebagai bukti aktifitas dan perkembangan Pendidikan di wilayah geografis Indonesia yang tercipta sejak masa Pemerintahan VOC hingga kolonial Belanda dan Pasca Kemerdekaan.

Arsip yang disajikan dalam naskah sumber arsip Pendidikan sejak masa Pemerintahan VOC hingga kolonial Belanda dan Indonesia. Selain daripada itu Naskah Sumber Arsip Pendidikan juga memuat informasi **pendidikan dalam rangka perjuangan Indonesia, pemberantasan buta huruf dan perkembangan pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan informasi atas khasanah pendidikan di Indonesia**. Penerbitan naskah sumber arsip diharapkan dapat meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme serta penguatan karakter bangsa yang pada gilirannya dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman makna pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, Oktober 2015

Kepala Arsip Nasional RI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL _____	i
KATA PENGANTAR _____	iii
DAFTAR ISI _____	v
BAB I DASAR PEMIKIRAN _____	1
Latar Belakang _____	1
Arsip Sebagai Sumber _____	3
BAB II SEKILAS SUMBER ARSIP _____	5
Periode VOC Sampai Pemerintahan Kolonial _____	6
Pasca Kemerdekaan _____	21
BAB III PENDIDIKAN DI INDONESIA _____	29
Pendidikan Dalam Rangka Perjuangan Bangsa Indonesia _____	32
Pendidikan Dalam Rangka Pemberantasan Buta Huruf _____	36
Perkembangan Pendidikan _____	42
BIBLIOGRAFI _____	79



Latar Belakang

Hakikat pendidikan mengandung empat dimensi: ekonomis, sosial, kultural dan personal yang harus mampu mentransformasi anak didik menjadi manusia dewasa yang berpengetahuan, berkepribadian dan sarat kearifan. Pendidikan harus mendidik anak manusia yang memahami nilai-nilai dan budayanya, dan menghargai nilai-nilai dan budaya orang/bangsa lain.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pendidikan dikontrol secara sentral, guru dan orang tua tidak mempunyai pengaruh langsung politik pendidikan. Pendidikan berguna untuk merekrut pegawai, yang mana pendidikan bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi pegawai perkebunan sebagai tenaga kerja yang murah. Sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama dengan sekolah di negeri Belanda, anak Indonesia tidak berhak sekolah di pendidikan Belanda. Pendidikan hanya merugikan anak-anak kurang mampu. Sistem pendidikan formal bagi penduduk Hindia-Belanda, meskipun terbatas bagi kalangan tertentu yang terbatas. Sistem yang diperkenalkan dengan tingkatan sebagai berikut:

1. *Europeesche Lagere School* (ELS), sekolah dasar bagi orang Eropa
2. *Hollandsch-Inlandsche School* (HIS), sekolah dasar bagi pribumi
3. *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO), sekolah menengah pertama
4. *Algemeene Middelbare School* (AMS), sekolah menengah atas

Mulai akhir abad ke-19 dan hingga darsawarsa awal abad ke-20, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia sangat beragam, meliputi sekolah dasar, sekolah raja, sekolah pertukangan, sekolah kejuruan, sekolah-sekolah khusus untuk perempuan Eropa dan pribumi, sekolah dokter, perguruan tinggi hukum, dan perguruan tinggi teknik. Untuk mengimbangi pendidikan Belanda, pada periode ini berdiri pula lembaga-lembaga pendidikan bercorak keagamaan dan kebangsaan oleh Muhammadiyah, Taman Siswa, Ins Kayutanan, Ma'arif, dan perguruan Islam lainnya.

Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan ditandai oleh munculnya gerakan pendidikan yang dipelopori oleh Muhammadiyah, Perguruan Taman Siswa, INS Kayutanam, Pendidikan Ma'arif dan perguruan islam lainnya.

Arsip Sebagai Sumber

Arsip berperan penting sebagai **Memori Kolektif Bangsa**, arsip dapat dipergunakan untuk memaknai sejarah perjalanan bangsa, nilai-nilai yang melandasi semangat perjuangan para pendiri bangsa, serta proses yang berlangsung setelah kemerdekaan berhasil diperoleh.

Arsip berperan penting sebagai **Memori Kolektif Bangsa**, arsip dapat dipergunakan untuk memaknai sejarah perjalanan bangsa, nilai-nilai yang melandasi semangat perjuangan para pendiri bangsa, serta proses yang berlangsung setelah kemerdekaan berhasil diperoleh.

Misi Arsip Nasional RI yakni memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa, ANRI menjamin publik untuk mengakses arsip statis.

Sumber-sumber arsip yang disajikan pada **Naskah Sumber Arsip Pendidikan** ini berdasarkan penelusuran dan penelitian sumber-sumber arsip pada khasanah arsip yang tersimpan di ANRI. Sumber-sumber arsip yang tercipta pada masa kolonial

dikelompokkan sebagai **Arsip Kolonial**, (berasal sejak masa VOC yang dilanjutkan dengan Pemerintahan Hindia Belanda) dan sumber-sumber arsip yang tercipta *pasca* Kemerdekaan RI, dikelompokkan sebagai **Arsip Republik**.

Sumber-sumber arsip masa kolonial (tahun 1602 sd. tahun 1942) yang tersimpan di *Landsarchief*, berisi arsip-arsip Perserikatan Dagang Hindia Timur (VOC), Masa Inggris (*Engelsche Tussenbestuur IET* atau *British Interregnum*) dan masa Pemerintahan Hindia Belanda. Arsip periode ini menunjukkan begitu banyak informasi yang terekam di dalamnya. Masa Pemerintahan Hindia Belanda meliputi khasanah arsip yang disebut dengan *gewestelijke stukken*, berisi arsip-arsip kegiatan administrasi secara regional, yaitu kegiatan pemerintahan lokal atau setempat berdasarkan pembagian wilayah administrasi yang kemudian disebut dengan **Arsip**

Keresidenan. Begitu banyaknya khasanah Arsip Keresidenan yang terakumulasi secara administratif berdasarkan pembagian wilayah pada masa VOC ini. Beberapa Arsip Keresidenan terdiri lebih dari seribu berkas.

Beberapa naskah sumber arsip yang telah diterbitkan ANRI baik secara tematis maupun kegiatan administrasi pemerintahan (seperti Memori Serah Terima Jabatan atau *Memorie van Overgave* pada masa pemerintahan Kolonial) dapat dipandang sebagai upaya ANRI mengungkapkan memori kolektif guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai budaya bangsa dan kebangsaan serta memupuk rasa cinta Tanah Air.

Naskah sumber arsip yang di publikasikan mengenai Pendidikan sebagai bagian dari khasanah arsip yang tersimpan di

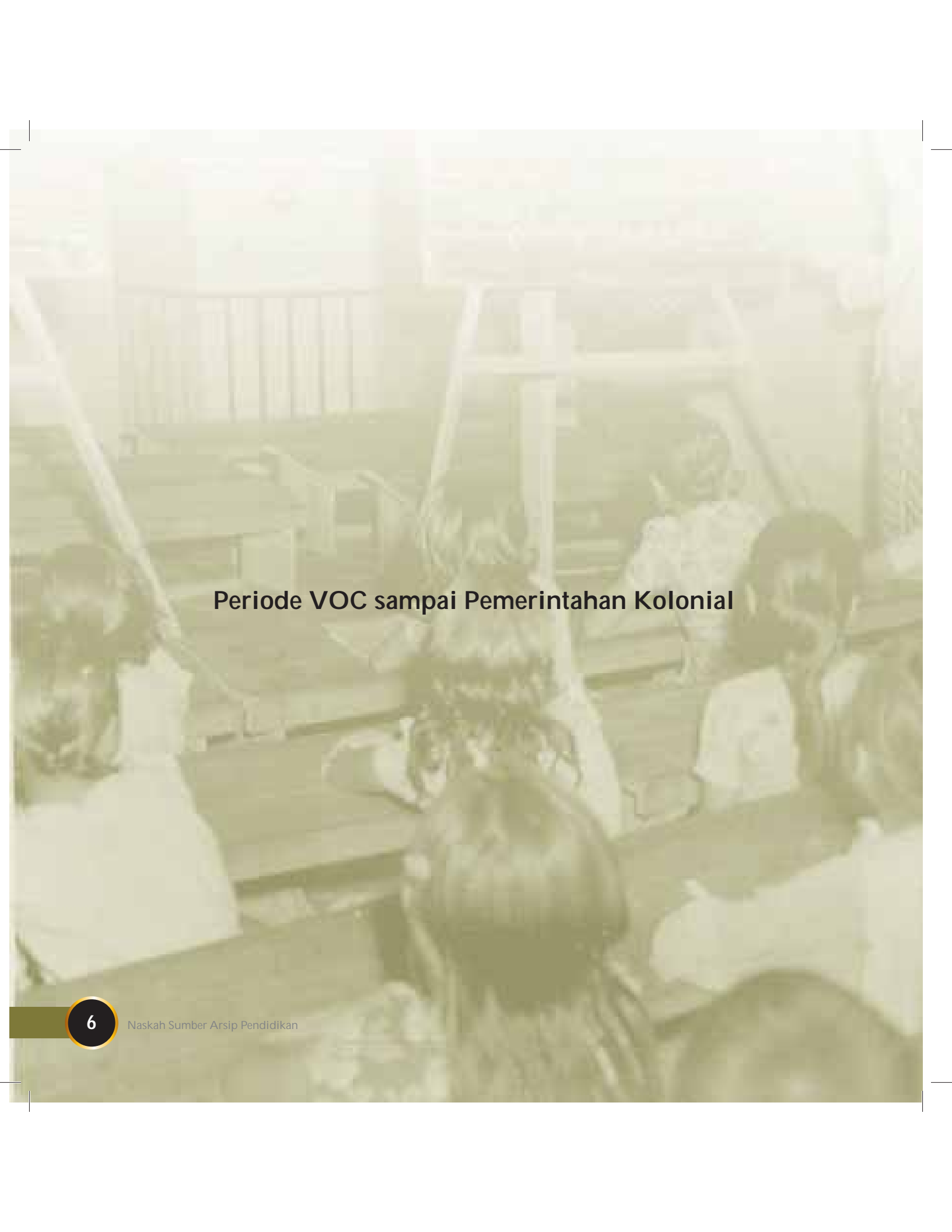
ANRI, dengan maksud untuk memberikan pemahaman bahwa kekayaan khasanah arsip masa kolonial ini melatarbelakangi adanya wilayah kekuasaan Pemerintahan Kolonial yang membentang hampir di seluruh Nusantara. Secara *de facto* menjadi bukti keberadaan Republik Indonesia. Setelah melalui proses yang panjang, secara *de jure* luas wilayah yang menjadi wilayah Indonesia, diungkapkan pada saat Pengakuan Kedaulatan Negara Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1949.

Sumber-sumber arsip yang disajikan selanjutnya dapat dipergunakan sebagai sumber primer dalam melengkapi informasi serta memberikan kontribusi bagi dunia akademik.

Pudarnya VOC pada akhir abad ke-18 menandai masa datangnya zaman kolonial Belanda. Tugas untuk mengatur pemerintahan dan masyarakat yang sebelumnya ditangani oleh kompeni (institusi dagang) kemudian diambil alih oleh Pemerintah Belanda yang menjadikan Hindia-Belanda sebagai tanah jajahan. Meskipun tetap berpihak pada kepentingan Belanda, system pendidikan pun berubah menjadi lebih “terbuka”. Muatan keagamaan yang di masa-masa sebelumnya sangat kental, diimbangi dengan muatan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kepentingan Belanda.

Mulai akhir abad ke-19 dan hingga darsawarsa awal abad ke-20, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia sangat beragam, meliputi sekolah dasar, sekolah raja, sekolah pertukangan, sekolah kejuruan, sekolah-sekolah khusus untuk perempuan Eropa dan pribumi, sekolah dokter, perguruan tinggi hukum, dan perguruan tinggi teknik. Untuk mengimbangi pendidikan Belanda, pada periode ini berdiri pula lembaga-lembaga pendidikan bercorak keagamaan dan kebangsaan oleh Muhammadiyah, Taman Siswa, Ins Kayutanan, Ma’arif, dan perguruan Islam lainnya.

Pada masa ini, pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu: pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan kejuruan, dan pendidikan tinggi. Tujuan pendidikan pada masa penjajahan Belanda lebih dititikberatkan kepada memenuhi kebutuhan pemerintah Belanda, yaitu tersedianya tenaga kerja murah untuk hegemoni penjajah dan untuk menyebarkan kebudayaan Barat.



Periode VOC sampai Pemerintahan Kolonial

Haruku Den 26 Maart 1817

3

In antwoord op Wtthlyt: Letteren van den N. V. G. z. heb ik de eer te dienen, dat de V. G. z. hieraan onders het Britsche Postu' zig te velygenes geimplijerders, te gesatartieren Bewonden hebben te weten

ten schreibe M. M. Kacchin met ten maom velykt Tractament van ffr^o 40

In velygenes inlonen schoolmeester opperschoolmeester J. D. N. Kacchin ffr^o 6-4

meester: Oma, N. Kacchin 5-02

J^o Wase C^o 3-22

J^o Abero J. Muntam 2-8

J^o Halalim L. Unoputi 2-8

J^o Laricun J. Tehumahu 4-36

J^o Kal B. Tupamahu 4-36

J^o Kiamakaj M. Muntama 3-22

J^o Tehulehu M. Keholo 3-22

J^o Kamariang J. Nejo 2-8

J^o Natisua N. N. Kacchin 3-22

J^o Kacjolo S. Salakaj 2-8

fpr^o 40 = 60

Enderschyen Kanger

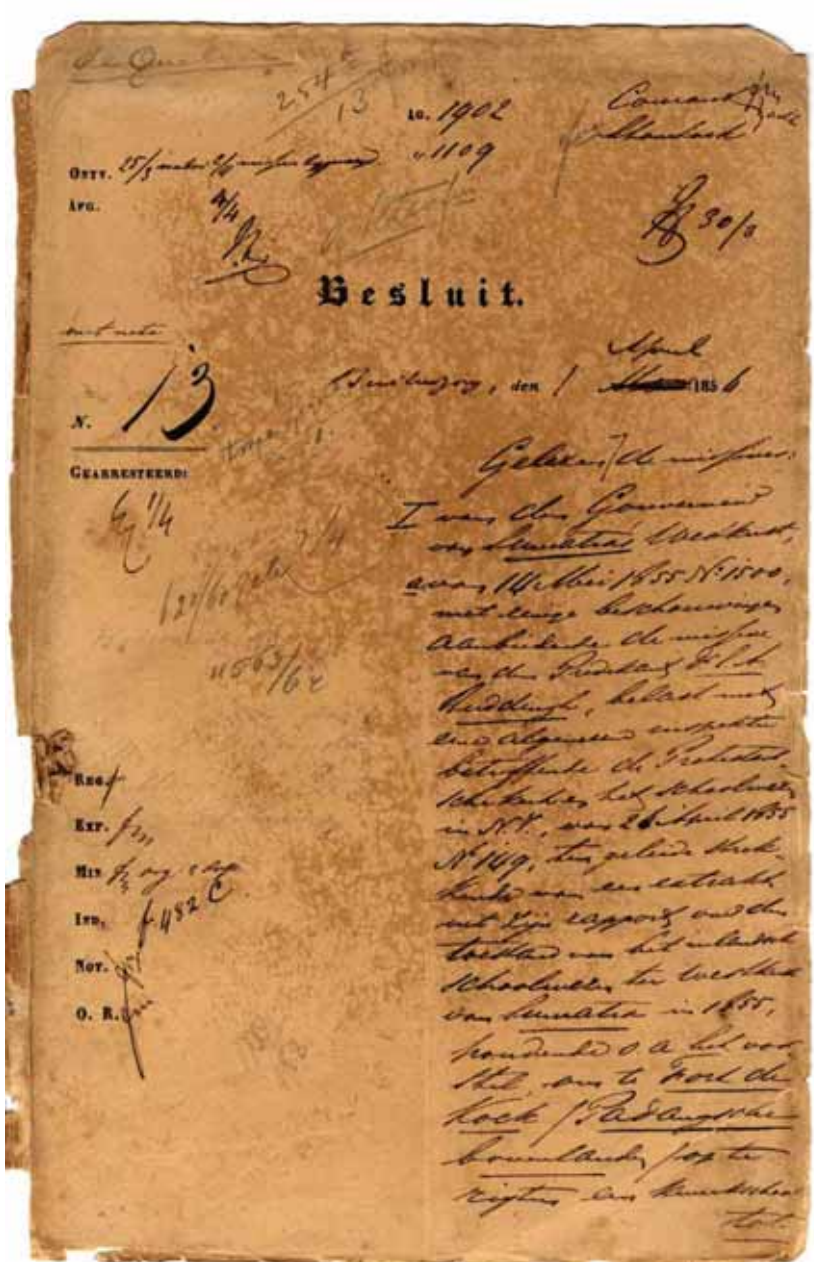
2 Portico, jedu' 40 ffr^o 12 in Chappin 3-20

2 Kwartieren 40 ffr^o 12 in 10-60

1 Gopisionerden militair J. Kacchin 2-60

fpr^o 19 = 12

Nama-nama Kepala Sekolah bangsa pribumi yang ada di Haruku, Ambon, 26 Maret 1817. ANRI, Ambon No. 998/O

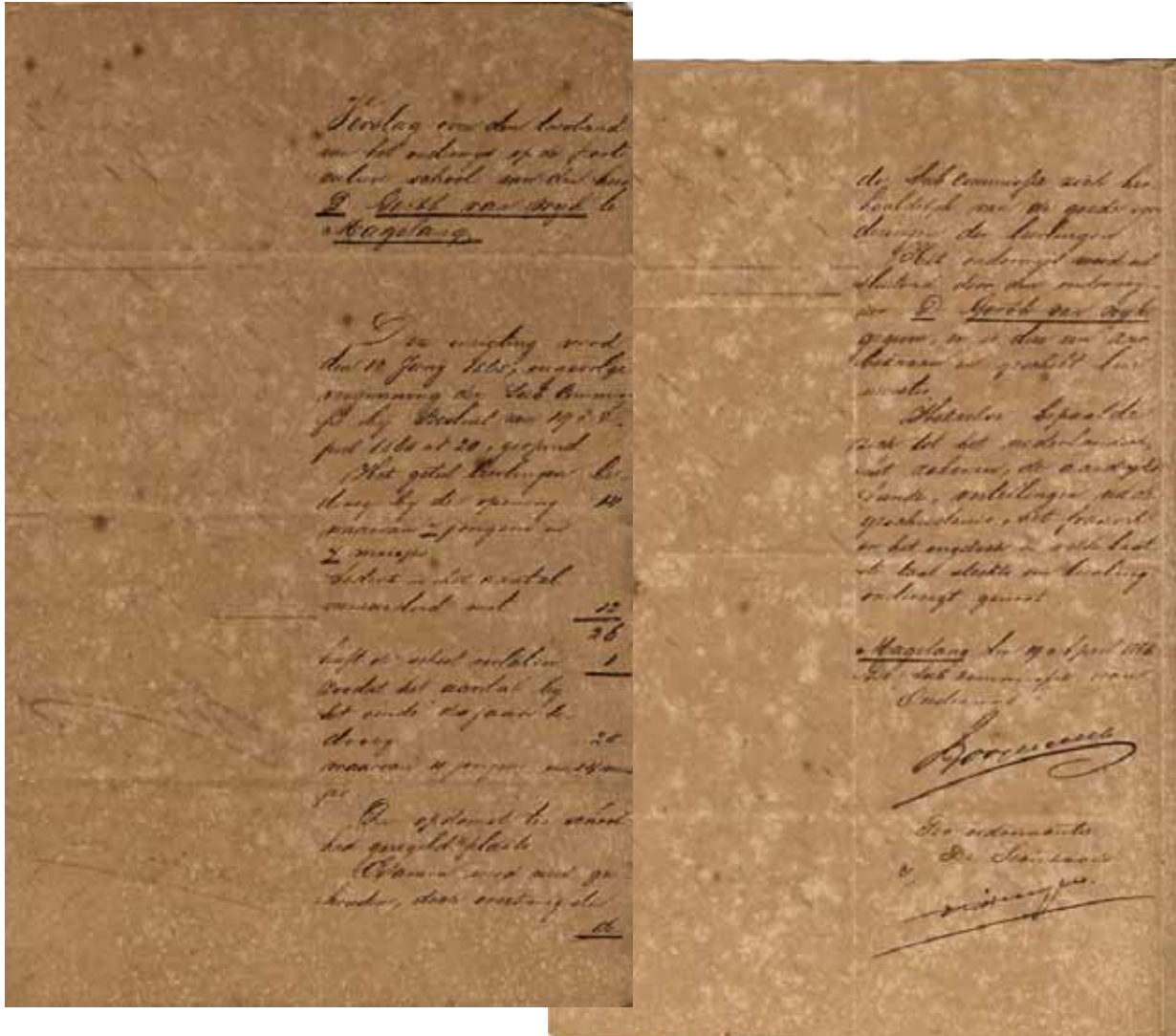


Surat Keputusan Gubernur Jenderal No 13 Tahun 1856 tentang pendirian Sekolah Kweekschool bagi kaum Bumi Putra di Fort de Kock (Padangshe Bovemlanden sekarang Bukit Tinggi), 1 April 1856.
ANRI, Algemene Secretarie
Besluit GG1 April 1856 No. 13

L. E. D.
*Staat der Scholen in de Minahasa op
 ultimo December 1856.*

No.	District	Negerij	Voor wens rekening	Getal kinderen	
				Engische vino.	Geestl. kinderen
1.	Tondano	Tondano	Gouvernement	500	205
2.	id.	Kappalaran	id.	103	75
3.	Sangewan	Sangewan	id.	163	99
4.	Kakas	Kakas	id.	156	160
5.	Kakaskasang	Lotta	id.	104	50
6.	id.	Saltiki	id.	89	40
7.	Lukupang	Lukupang	id.	48	48
8.	Tonsea	Kipna	id.	120	95
9.	Manado	Manado	id.	111	41
10.	Klabat di bawa	Boyoke	id.	30	45
11.	Sonbariry	Sarawangke	id.	215	103
12.	Amurang	Amurang	id.	150	40
13.	Tondano	Kakabering	Geneesmiddelen	54	52
14.	id.	Porer	id.	68	58
15.	id.	Kelangan	id.	81	70
16.	id.	Sawangan	id.	42	39
17.	id.	Kopby	id.	70	65
18.	id.	Ngawangke	id.	43	40
19.	id.	Lalumpey	id.	36	77
20.	id.	Tulap	id.	52	41
21.	id.	Walutony	id.	47	35
22.	id.	Talap	id.	100	70
23.	id.	Walumbia	id.	100	91
24.	id.	Balyan kistit	id.	36	50
25.	id.	Negerij baru	id.	70	52
26.	id.	Kopy	id.	70	50
27.	Sangewan	Kop	id.	79	54
28.	id.	Palamba	id.	65	46
29.	id.	Talawatu	id.	44	30
30.	Kakas	Simbokoy	id.	27	25
31.	id.	Kajuwatu	id.	41	30
32.	id.	Porer	id.	34	27
33.	id.	Saja	id.	115	77
34.	id.	Balyan	id.	52	41
35.	Rimboken	Rimboken	id.	252	173
36.	id.	Kasuratan	id.	62	42
37.	Tonpassje	Tonpassje	id.	169	119
38.	id.	Teluck	id.	63	42
39.	id.	Kanonang	id.	56	39
40.	id.	Tekin	id.	70	55
41.	id.	Wanga	id.	39	20

Daftar sekolah di
 Minahasa pada akhir
 Desember 1856.
ANRI, Manado No. 43



Laporan kondisi pendidikan/pengajaran di Sekolah Dasar Swasta di Magelang, 1865.

ANRI, Hoofd Commissie van Onderwijs 2/6.A

AGENDA N^o. 15174/92

BATAVIA, den 26 Nov 1872

N^o. 11068

MISSIVE aan G. Generaal
Notat

DE DIREKTEUR
DER BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN,

Gelezen de inloopende van den G. Generaal
van Endevoegde, daterend van Batavia
den 15 November 1872, N^o. 10055

B. 21 November 1872 N^o. 11068
15 Nov 1872 N^o. 10055
TERUG aan *15-11-72*

voor

Jan 1871

BEGROOTING

EXPEDITIE *20/11*

AGENDA

INDEX *10/11*

Gelet op *Sub van 25 October 1872, N^o. 10201*
15 November 1872, N^o. 12006

HEEFT BESLOTEN:

Te schrijven

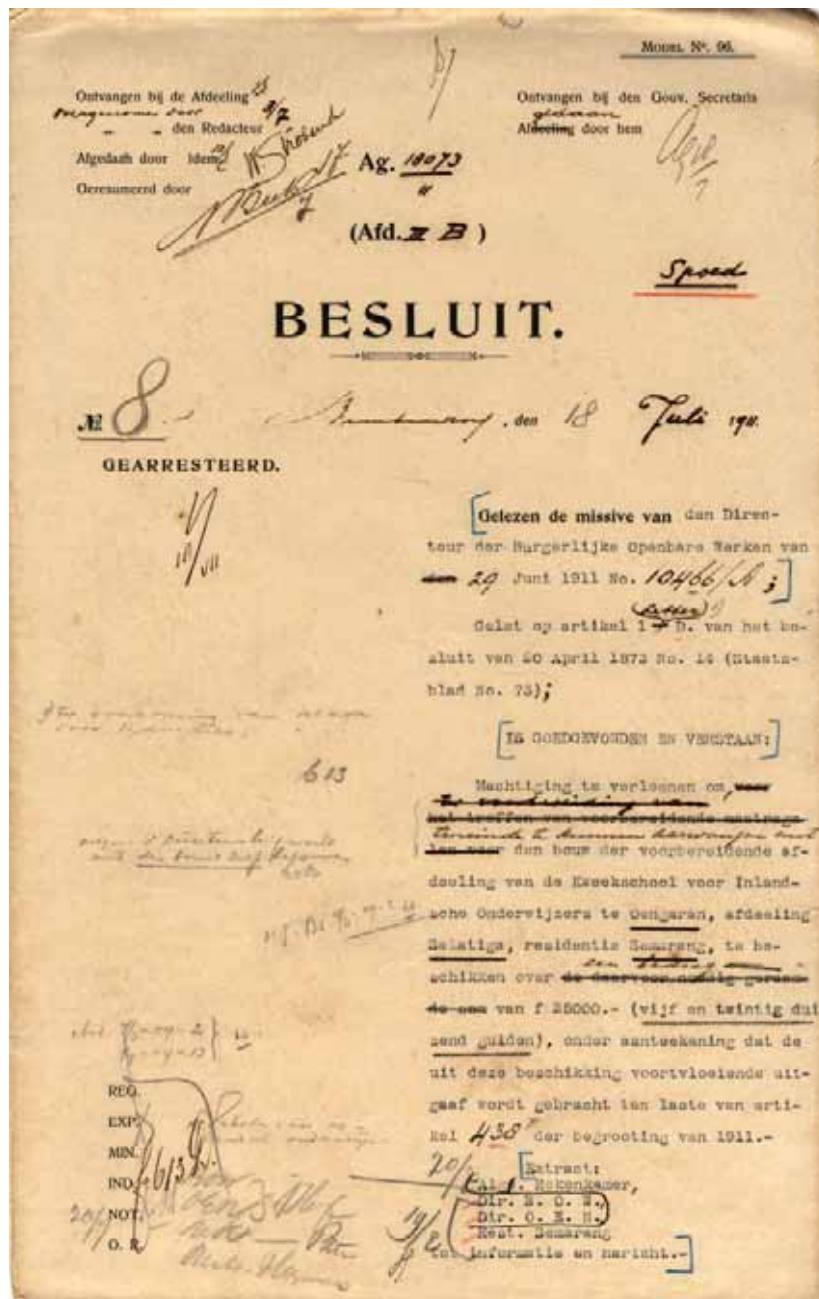
BIJLAGEN:

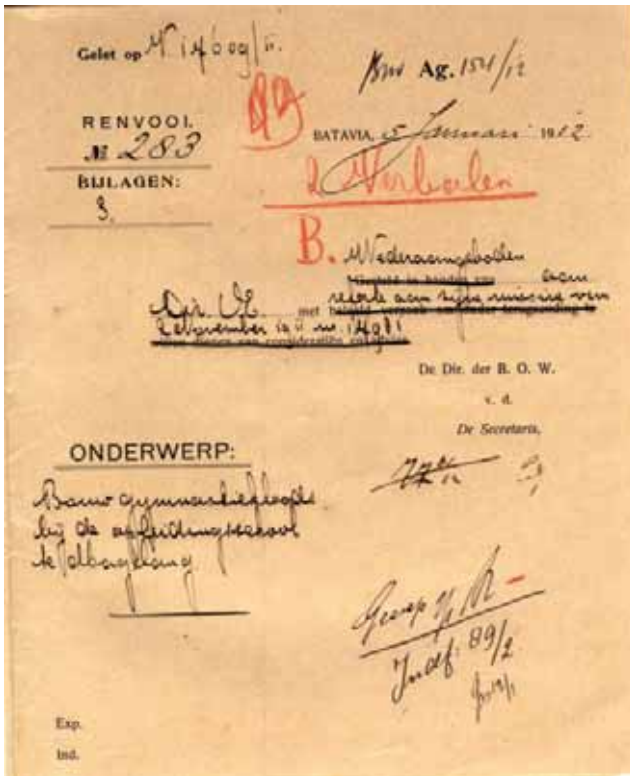
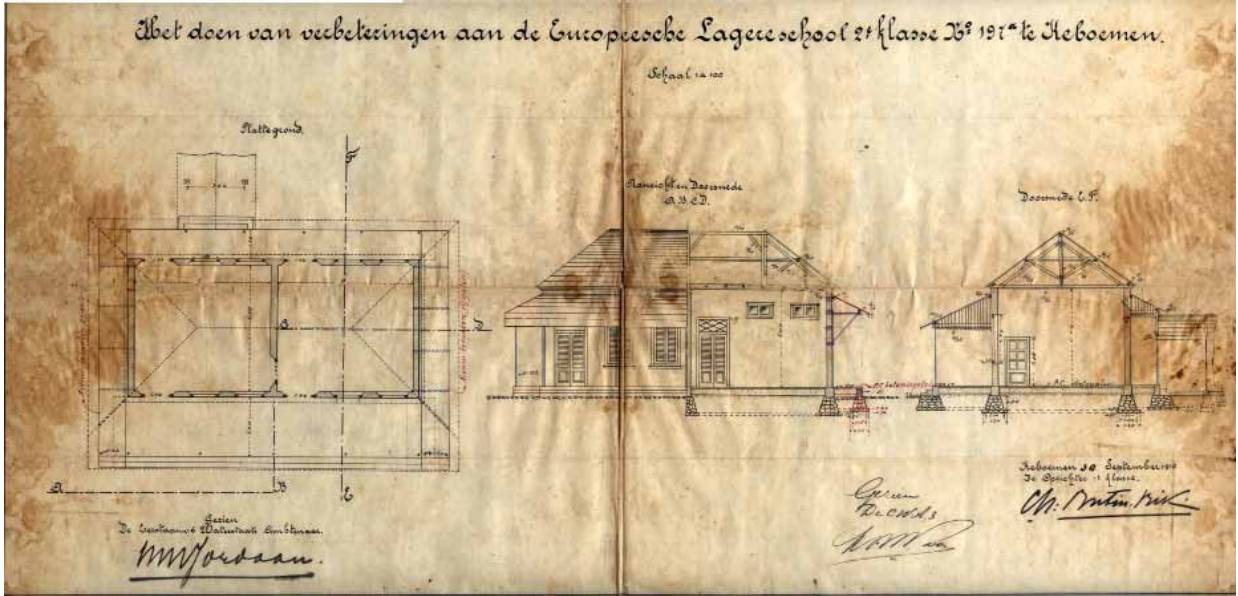
Indonesischland

Van
Dijne Excellentie den G. Generaal
Generaal
Ik heb de van den G. Generaal
aan te bedenken de aan U hem gevogte
van den Directeur van Endevoegde
daterend van Batavia van 15 November
j. 1872, houdende bijlagen, houdende
de voorstellen betreffende de verplaatsing
naar Magelang van de Nederlandsche
Indonesische school, tevens gevogte
te Soerabaja
Ten opzichte daarvan verzocht ik
het mij vergund den G. Generaal
dijghet het overzonden mede te deelen
dat het daterend van de 15 Nov 1872

Surat dari Direktur Pendidikan Agama dan Industri mengenai rencana kepindahan sekolah guru bagi guru bumiputera yang ada di Surakarta ke Magelang, 26 November 1872.
ANRI, BOW A II No. 85

Surat Keputusan tanggal 18 Juli 1911 No. 8 mengenaipembangunan persiapan bagian dari sekolah guru untuk guru sekolah dasar pribumi di Ungaran, afdeling Salatiga, Keresidenan Semarang, 1911.
ANRI, Algemene Secretarie
Besluit GG 18 Juli 1911 No. 8

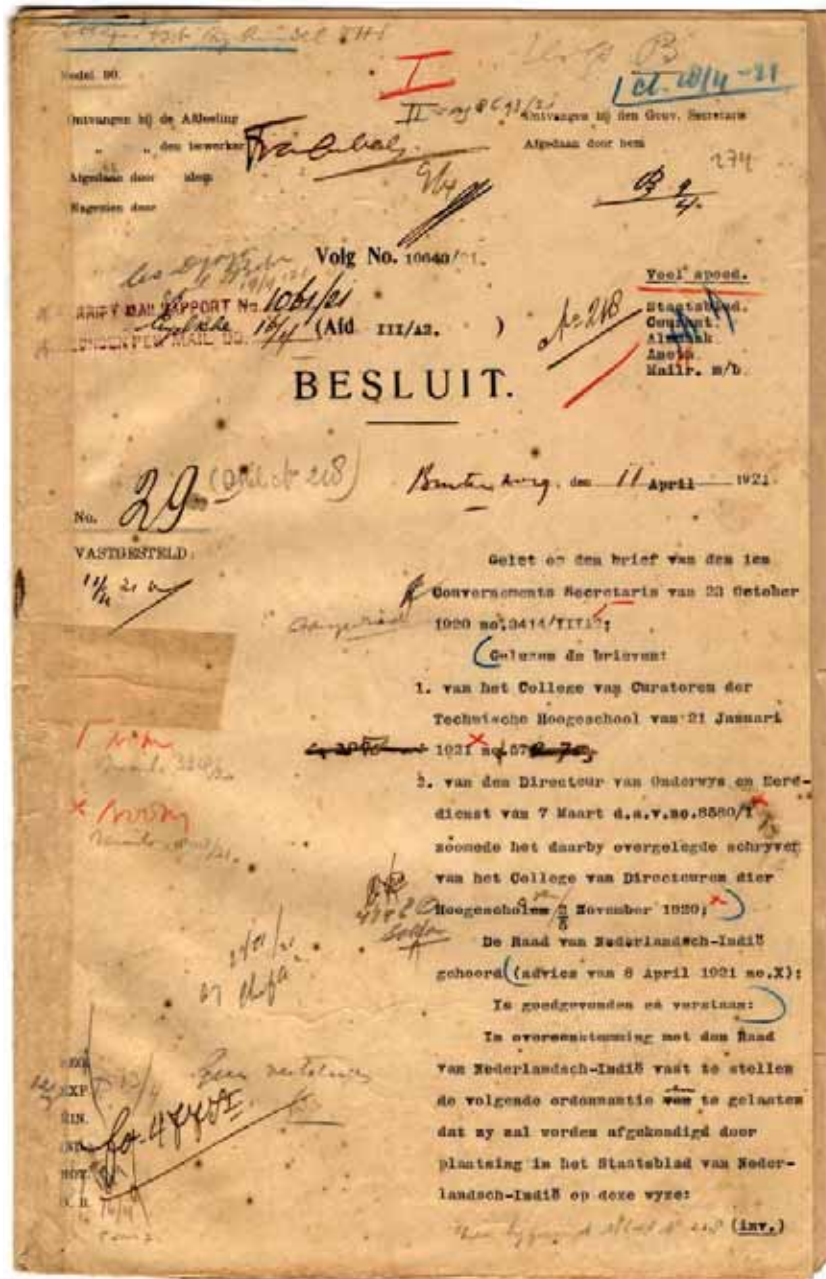




Surat dari Kepala bagian Sarana di Yogyakarta kepada Direktur Pekerjaan Umum mengenai pelaksanaan kerja pembangunan sekolah dasar di Purwodadi, Loano, Kemiri di Keresidenan Kedu, 2 November 1911.

ANRI, BOW II A 34

Besluit No. 29 tanggal 11 April 1921 tentang pengembangan jurusan Teknik Kimia di Technische Hooge School, 11 April 1921. ANRI, Algemeene Secretarie Mgs. No.2061



MEMORIE VAN TOELICHTING.

I. De Hollandsch-Inlandsche School te MENADO.

Bezige jaren geleden werd door de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van Hollandsch-Inlandsche Scholen in de Minahassa door middel van handteekeningen en inschrijving van leerlingen getracht de urgentie aan te toonen van een Protestantisch-Christelijke School te MENADO. De erkenning van deze urgentie door het Gouvernement werd verkregen, waarop het Bestuur direct een aanvang deed maken met het ontwerpen van een bouwplan. Door omstandigheden duurde het zeer lang, voordat dit plan gereed was. Toen eindelijk de teekening met het verzoek om subsidie werd ingediend, was evenwel de tijd van malaise en financieele moeilijkheden reeds begonnen en het Bestuur weet en begrijpt, dat dit de reden is, waarom tot nu toe geen toetennend antwoord op zijn verzoek is afgekomen. Toch is het in volle overeenstemming met de overige bestuurders, als steller dezes nogmaals eerbiedig aandringt op vervulling van bovengezonden wensch. En dat om de Volgende redenen.

De wensch tot oprichting van een Hollandsch - Inlandsche School op Protestantischen grondslag is uit de Gemeente te MENADO zelf opgekomen. Met groote offervaardigheid heeft zij het ontbrekende gewisste van het bouwkapitaal reeds nu bijeengebracht en zich bereid verklaard, een flink schoolgeld te betalen, opdat hun school zoo goed mogelijk zou kunnen worden. Reeds drie malen hebben zij hun leerlingen laten inschrijven, maar nog steeds hebben zij hun school niet gekregen. Menado is overwegend Protestant. De Rooms-Katholieken, die ver in de minderheid zijn, beschikken over een Fröbelschool, een Hollandsch-Inlandsche dagschool en een Muloschool. De bestaande OCHGvernamescholen bieden geen plaats aan de talrijke gegadigden, zoodat telken jare velen moeten worden afgewezen. De bevolking van de Rooms-Katholieke inrichtingen is dan ook vroeër een aanmerkelijk deel Protestant, die van de Muloschool verleden jaar zelfs geheel. Zonder eenige vijandschap tegen de andere gezindte kan worden geconstateerd, dat dit een ongesonde toestand is, die moet leiden tot wrijving en rustig naast elkander werken onder eigen geloofgenooten in den weg staat.

Het personeel voor de school is zoo goed als gevonden. Alles zal in het werk worden gesteld, de school zoo goed mogelijk te maken en ze te doen beantwoorden aan haar roeping, de vorming van ontwikkelde en goede Christenen, dan ook goede en loyale onderdanen van het Nederlandsch-Indische Gouvernement.

II. De Hollandsch-Inlandsche School te TOMOHON (met internaat voor jongens).

Bij het verzoekschrift om erkenning van de behoefte aan een school zijn de noodige stukken gevoegd en o.a. ook een uitvoerige Memorie van Toelichting. Naar dit laatste stuk kan hier worden verwezen.

Op enkele punten wenschen we hier evenwel nogmaals de aandacht te vestigen.

Bedoelde inrichting zal zich vooral bezighouden met de opvoeding der jongens. Externs meisjes zullen niet worden geveerd, maar dat zullen alleen leerlingen van TOMOHON zijn. De Jongens zullen als externe leerlingen ook uit TOMOHON kunnen zijn, maar het grootste gedeelte zal komen uit de gehele Minahassa. Dit beteekent de vervulling van een

lang gekoesterd wensch der bevolking, tevens bezien wordt uit de talrijke leerlingen, die reeds zijn ingeschreven. De bevoening en opvoeding der vele jongens, leerlingen van Zagnachien, is de belangrijkste instelling en het om door de onderz. die is laatste wensch, naar geen Hollandsch-Inlandsche of Speciale School in een wijk gebouwd wordt, welke zij hun jongens in een verpleev. Internaat kunnen onderhouden. Voord. de school is bezocht door de Heilzame School te TOMOHON, voor de jongens zal dezelfde worden gebouwd, dat verspreid is een di. gewaarde School. Dit internaat zal volgens de bestaande teelting van niet binnen worden gevestigd. Dit zullen zij ook alle studenten moeten te krijgen.

Hij vraagt den alleen aandacht van de behoefte aan een school, waarbij dit internaat behoort en dat is grond van de school, de reeds zijn gevestigd.

De inrichting zal, ingevolge een beslitting met het Bestuur van de Heilzame School, worden gevestigd in de oude gebouwen der Heilzame School. Daar vervoeren zijn nu een gevestigde en de school zal voortaan gevestigd worden op een school gebouwd. Het is niet noodig, dat nu is gevestigd in de oude school. Het is niet noodig, dat nu is gevestigd in de oude school. Het is niet noodig, dat nu is gevestigd in de oude school. Het is niet noodig, dat nu is gevestigd in de oude school.

Geen tot bestuur.

(Handwritten signature)
Bevestigde.

(Handwritten text)
B. B. ... van de ...

Nota keterangan mengenai Hollandsch Inlandsche School (HIS) di Manado yang Tomohon yang memiliki asrama untuk murid laki-laki dan disebut juga untuk anak-anak perempuan, Mei 1923. ANRI, Ag. 14868/23 (Algemene Secretarie Besluit GG 21 Februari 1920 No. 1)

Surat Kepala Distrik
Tanah Tinggi kepada
Asisten Residen
Tanah Merah tentang
sekolah-sekolah di Tanah
Merah, 16 Oktober 1929.
ANRI, Boven Digoel No.311

Tanah Tinggi 16 October 1929.

N: 26
dep
p/

Onderwerp: School Tanah Tinggi.

Ik heb de en tethangedel gestreepte
het onderstaande betrefte mede te delen.

Het was j.l. Vrijdag [14/10-1929]
dat ik - wa het intusseningenkamp de zijne
soud gegaen - een wijle bezoek heb gebracht 1/2
school te Tanah Tinggi. Ik heb als onderwij-
zers aan: Sarijina sll 2:2 en Kasnami sll
N: 46. In helpe dese mutatie plaats gehad
1/2 onderwijzende personeel van Tanah Tinggi.

De kinderen waren juist bij
een Hollandsch school te kintje. Dat het
Hollandsch 1/2 school als voortset gebruyge
wordt, bewijst, dat Sarijina tegen de kinderen
Hollandsch sprek.

Sarijina seide tegen me, dat
de kinderen nog te jong zijn om te leeren. De
meer gevorderde kinderen worden door Kasnami
1/2 ahangensende kamer onderwijzen. In de
klassen, waar Sarijina onderwijst gaf, waren 9
kinderen en in die, waar Kasnami onderwijst
was, 8 kinderen.

Dinsdag 15 dezer werd mijn
aandacht getrokken door een grote praam
met een goede vloer er van en vol beladen met
kinderen. Een andere praam, eveneens vol
belast, vergezelden de gevogde praam. Ik hoorde
en onduidelijk gezang. De praam vonden de
kale iten binnen. Na eenigen tijd kwamen
de praam van uit de kate iten 1/2 richting
1/2 intusseningenkamp. terug. Toen kongen de
kinderen al harder en harder een Maliesche
dunstje, waarvan ik slechts de woorden u. m.
"Koblenji orang barangan, sangtara dengan
pendjara" heb kunnen opvangen. Het zal

aan
Het Hoofd van Plaatselijk Bestuur
te Tanah Merah

(21)

Opisari
van leerlingen en Onderwijzers van naturalisten
op Utsihi 2 kwartaal 1939

nr.	Naam en stb. nr. van de Ouderling	De org. voor het Onderwijzen	naam geslacht en leeftijd van de leerling	naam des ouders van de leerling	stb. nr.
Onder organisatie van P.P.					
1.	Djogedolhedie	Leuwiswata	Hatjuna Kadid Kaelmad	Demetarius Samingon Harwick Kasid	
2.	Kesjani	Chatik Palana	Safarrah	Kaaren Kasid	
3.	Pisjama	Achriswata	Wijayah Wastjan Djogedjuna	Pisjama Demetarius Ghaerarius	
4.	Zainalabidin	Zainalabidin	Kisari Kasari stb. 2000	Samingon Demetarius	
Niet verbonden aan P.P.					
5.	Abanin	Kongolharu	Kongolharu Sugih Sugih Sugih Sugih Sugih Sugih Sugih	Kongolharu Sugih Abanin	
6.	Kawongkong	Abch. Anon	Kawongkong Kawongkong Kawongkong Kawongkong Kawongkong Kawongkong Kawongkong	Abch. Anon Kawongkong	
7.	Pasaraw	Pasaraw	Sarasari Sarasari	Sarasari	
8.	Chamin	Chamin	Kasari Kasari	Chamin	
9.	Kasari	Kasari	Kasari	Kasari	
10.	Sekasalehan	Sekasalehan	Kasari Kasari	Sekasalehan Sikandari	
Standardschool.					
santal leerlingen					
11.	klas	3 jongens	3 meisjes		
12.	"	"	"		
13.	"	"	"		
14.	"	"	"		
15.	"	"	"		
16.	"	"	"		
17.	"	"	"		
18.	"	"	"		
19.	"	"	"		
20.	"	"	"		

Daftar murid dan pengajar di Tanah Merah, 1939. ANRI, Boven Digoel No.317

UITSNEDSEL uit het Register der Besluiten
van den Resident van Tapanoeeli

TAPANOEELI, den 10 OKTOBER 1940.-
DE RESIDENT VAN TAPANOEELI.

Gelezen het schrijven van den Gouverneur van Sumatra
dd. 2 October 1940 No. 3646/F.N. 41/IV waarbij werd toegestaan
van het in de landstreekbegroeting 1940 Tapanoeeli, onder sub-
art. 4A.5A.2.4b. uitgetrokken credit een bedrag ad f45.- te
blokkeeren en dit bedrag beschikbaar te stellen ten behoeve
van de landstreek "Nias en Batoe Rilanden" als verhooging
van het credit bedoeld bij sub.art.4A.5.2.4b.

Overzeggende dat het bij den. besluit dnx.5 Juli 1940
No.177/F ten behoeve van den Inspecteur van het Inlandsch
Onderwijs te Tarctoeng voor het doen van diverse materiele
uitgaven gedurende het jaar 1940 ten behoeve van de Gouver-
nements Inlandsche scholen (vervolgelingen) in de landstreek
"Nias en Batoe Rilanden" ten volle beschikbaar gestelds be-
drag ad f10.- niet toereikend blijkt te zijn.

willende in verband daarmede overgaan tot verhooging
van het bij voren genoemd besluit beschikbaar gestelds bedrag.
Gelet op het Gouvernements Besluit van 16 December 1939
No.20 (Staatsblad No.709).

HEEFT BESLOTEN :

Het bij den. besluit dd.5 Juli 1940 No.177/F ten behoe-
ve van den Inspecteur van het Inlandsch Onderwijs te Ta-
rctoeng, residentie Tapanoeeli Gouvernement Sumatra voor
het jaar 1940 voor het doen van uitgaven voor:

a. Waterverbruik	} Diverse uitgaven v.s.v. met al- ders omschreven
b. Onderhoud meubilair	
c. Huishoudonderwijs	
d. Landbouwonderwijs	

ten behoeve van de Gouvernements Inlandsche scholen (ver-
volgelingen) in de landstreek "Nias en Batoe Rilanden" be-
schikbaar gestelds bedrag ad f10.- te verhoogen met f 35.-
en alsoo te brengen op f45.- (vijf en vijftig gulden).

Onder aantekening dat de uit dit besluit voort-
vloeiende uitgaven v.s.v. het jaar 1940 zullen worden ge-
bracht ten laste van sub-art.4A.5.2.4b. van hoofdstuk II
van de afdeling IV A der begroeting van dat jaar.

AFSCHRIFT dezes zal worden verleend aan de Alge-
meene Rekenkamer, den Directeur van Binnenlandsch Bestuur
(in duplo) den Directeur van Onderwijs en Eeredienst, den
Adviseur v/h Inlandsch Onderwijs, het Hoofd van het Centraal-
Kantoor voor de Comptabiliteit te Medan, den Inspecteur
van het Inlandsch Onderwijs te Tarctoeng, den Assistent
resident van Nias, den Controleur der Batoe Rilanden tot
inlichting en bericht.

Stemt overeen met voora. register.
De v.d. Residentie Secretaris,

A A B
den Directeur van Binnenlandsch Bestuur
te
Batavia Centrum.

Surat Keputusan
Residen Tapanuli
kepada Directeur
Binnenlandsch Bestuur
tentang perubahan
budget untuk
kebutuhan sekolah
di daerah Nias dan
Kepulauan Batoe,
10 Oktober 1940.
*ANRI, Binnenlandsch
Bestuur No. 410*



PASCA KEMERDEKAAN

I. RESSORT.

Ressort Pemeriksa Sekolah² Ra'jat, ialah seleroek Kesultanan Bima, yang berkedudukan di Raba. Sekolah-sekolah dalam ressort ini ada yang dapat dikondjoengi dengan auto atau kenderaan yang lain, dan sebahagian ada yang dapat dikondjoengi dengan kuda sadja; djoega ada yang boleh dikondjoengi dengan perahu, tetapi dalam moesin barat agak berbahaya .-

II. BANJAKNJA SEKOLAH RA'JAT I.-

Pada permulaan tahoen adjaran 2602/2603, jaitoe pada 1 Machi-gatsu 2602, banjarknja sekolah Ra'jat I ada 42 boeah, jaitoe:

Dalam Kedjemelian Sasana ²	7 boeah
" " Wera	2 "
" " Wawo	4 "
" " Woha	3 "
" " Belo	4 "
" " Solo	6 "
" " Monta	4 "
" " Donggo	3 "
" " Sape	1 "
" " Sanggar	1 "
" " Dompoe	4 "
" " Kempe	2 "

D j o g m l a h 42 boeah
Pada permulaan boelan Ju-gatsu 2602, diboeka poela seboeah sekolah Ra'jat I dalam Kedjemelian Donggo, jaitoe di Sanggar, sehingga banjarknja sekolah Ra'jat I menjadi 43 boeah.-

Diantara 43 boeah sekolah Ra'jat I itoe, ada 3 boeah yang berkelas IV, jaitoe sekolah Ra'jat I Dompoe (Kedjemelian Dompoe), sekolah Ra'jat I Sila (Kedjemelian Solo), dan disekolah Ra'jat I (Kedjemelian Sape).-

Ketiga tempat ini pernah ditempat sekolah Ra'jat. Dalam tahoen adjaran 2602/2603 hanya terdapat dua boeah sadja sekolah Ra'jat I baroe, jaitoe sekolah Ra'jat I Raba II dan sekolah Ra'jat I Rangari .-

Sekalian sekolah² ini diboeka oentoek oemoen, dja-di boekan oentoek anak negeri Bima sadja .-

III. BANJAKNJA GOEROE .-

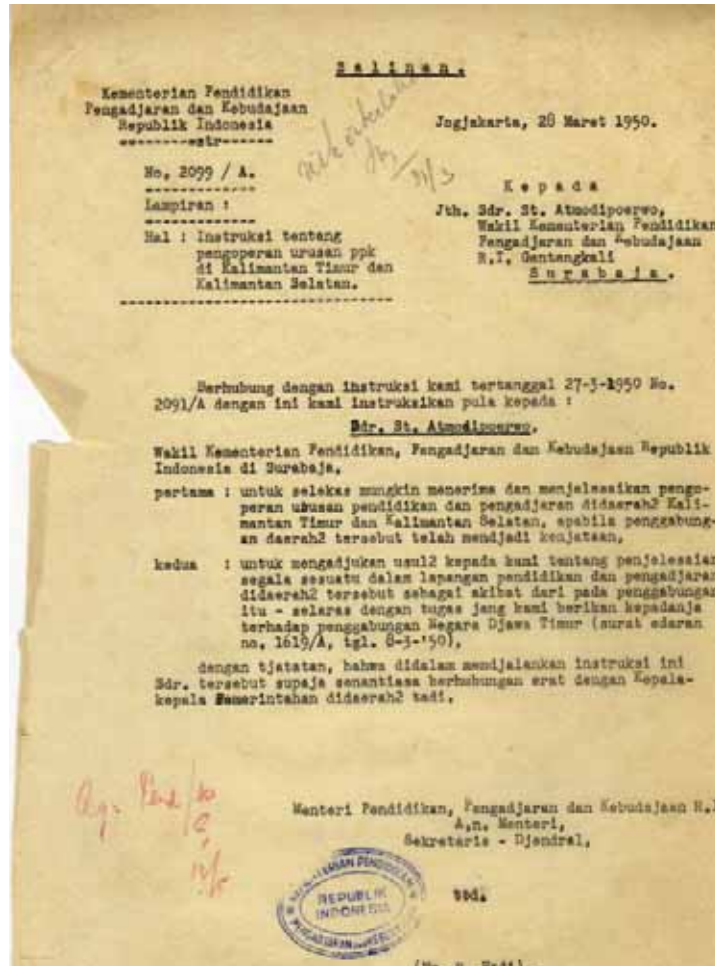
Pada akhir tahoen adjaran 2602, jaitoe boelan Shi-chi-gatsu 2602, banjarknja goeroe sekolah Ra'jat I 96 orang, jaitoe 41 orang Kepala sekolah dan 55 orang pembantoe. Seorang diantaranya berasal dari sekolah Normal di Makassar tetapi hingga kelas sadja. Ia ini disesoeikan haknja dengan goeroe-goeroe yang berasal dari sekolah Bakal Goeroe Sekolah Ra'jat I .-

Pada akhir tahoen adjaran 2602/2603 banjarknja goeroe pada sekolah Ra'jat I, ada sebahagi yang ternyata ditambah ini:

Kedjemelian	Banjak sekolah	Kepala sekolah	Pembantoe	Djoenlahnja
Sasana ²	7	7	10	17
Wera	2	2	2	4
Wawo	4	4	6	10
Woha	3	3	4	7
Belo	4	4	6	10
Solo	6	6	9	15
Monta	4	4	4	8
Donggo	3	3	2	5
Sape	1	1	6	9
Sanggar	1	1	1	2
Dompoe	4	4	7	11
Kempe	2	2	5	7
Djoenlah:	43	43	62	105

Bertambah -

Bagian awal dari Laporan Tahunan Dinas Perguruan antara lain tentang sekolah rakyat di Kesultanan Bima, 21 Mei 1943. ANRI, Kerajaan Bima No.S90

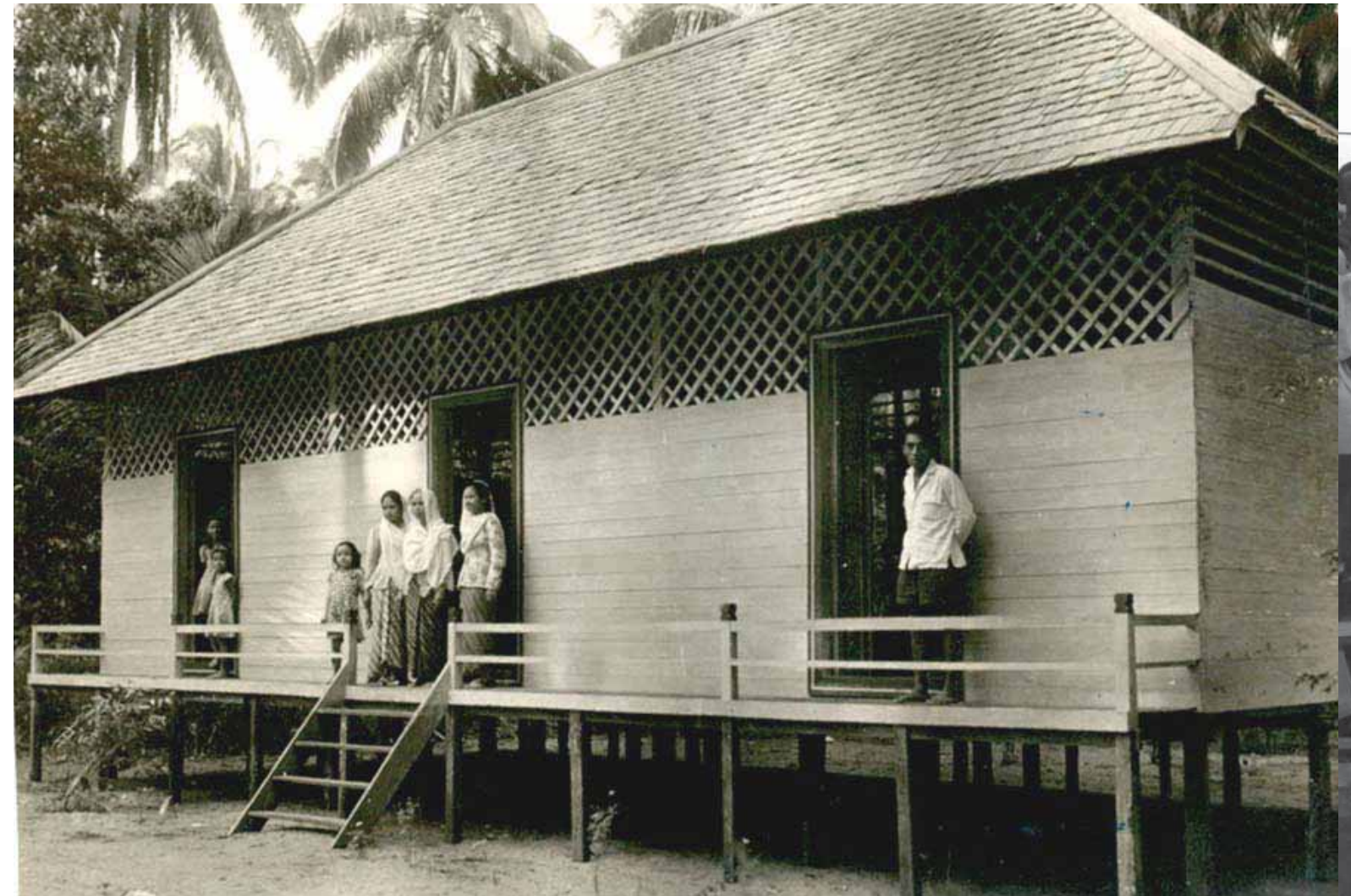


Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Mr. Hadi kepada Wakil Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jawa Timur, St. Atmodipuro mengenai instruksi untuk mengadakan perjalanan orientasi urusan pendidikan dan pengajaran di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dan instruksi tentang pengoperan urusan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, 28 Maret 1950. ANRI, Sekretariat Negara RI Jogja No. 91





Peresmian Perguruan Tinggi Gadjah Mada di Istana Presiden, nampak Prof. Dr. Sardjito tengah memberi pidato, 12 Agustus 1950.
ANRI, Kempen 50042



Gedung Sekolah Madrasah di Sungai Besar, Ketapang, 1951.
ANRI, Kempen No.510917 kk 11



Peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian oleh Presiden Soekarno, Bogor, 27 April 1952.
ANRI, Kempen 520427 FJ 12



Sekolah Indische Nederlandsche School (INS) di Kayu Tanam sedang dikunjungi rombongan Wapres RI Moh. Hatta, 23 April 1953.

ANRI, Kempen 530423 CC 3

Pendidikan di Indonesia

BAB III

Amanat dari para pendiri Bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan “falsafah Pancasila” dibidang pendidikan yaitu meningkatkan kemampuan secara optimal terutama dalam peningkatan watak atau karakter pendidik dan budi pekerti.

Salah satunya adalah direalisasikan dengan cara memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui pendidikan. Upaya ini bertujuan untuk membentuk dan membangun manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Amanat Pemimpin Besar Revolusi

1. Dalam amanat saja, Lahiraja Pantjasila, saja telah mengemukakan fikiran-fikiran jang mendasari proses "NATION BUILDING", jaitu adanja keinginan bersama untuk membangunkan djiwa Bangsa jang bersatu, persatuan karakter karena persamaan nasib dan patriotisme.
2. Proses "NATION BUILDING" itu terus-menerus memerlukan aktivitas jang dinamis, pemupukan mental dan djiwa jang ingin bersatu, persamaan watak atas dasar persamaan nasib, patriotisme, rasa-setia-kawan dan rasa loyal terhadap Tanah Air Indonesia.

Siapa jang tidak berdiri diatas landasan "NATION BUILDING" tadi, sesungguhnya dihindangi oleh penjakit "retak dalam djiwa", karena mungkin djiwanja dikuasai oleh loyalitas-kembar atau loyalitas-ganda.

3. Saja membenarkan usaha-usaha djiwa muda dalam pembinaan kesatuan Bangsa ini, dengan menghilangkan sikap-sikap dan sifat-sifat menjendiri (eksklusivisme), dengan djalan penjatuan, pembauran (asimilasi) dalam tubuh Bangsa Indonesia.
4. Saja gandrung akan kesatuan dan persatuan Bangsa Indonesia, saja tidak mau mengenal pembatasan "asli" dan "tidak asli", persukuan, serta pementjilan-pementjilan jang berupa apapun dalam kesatuan tubuh Bangsa Indonesia.

Bogor, 15 Djuli 1963.

PEMIMPIN BESAR REVOLUSI BANGSA INDONESIA,

SUKARNO

Amanat Pemimpin
Besar Revolusi tentang
"Nation Building",
15 Juli 1963.
*ANRI, Pidato Presiden
No. 506*



Presiden Soekarno tengah memberi sembah sujud kepada Ibunda dalam kunjungannya di Blitar, 3 November 1953.

ANRI, SKR-947

PENDIDIKAN DALAM RANGKA PERJUANGAN INDONESIA

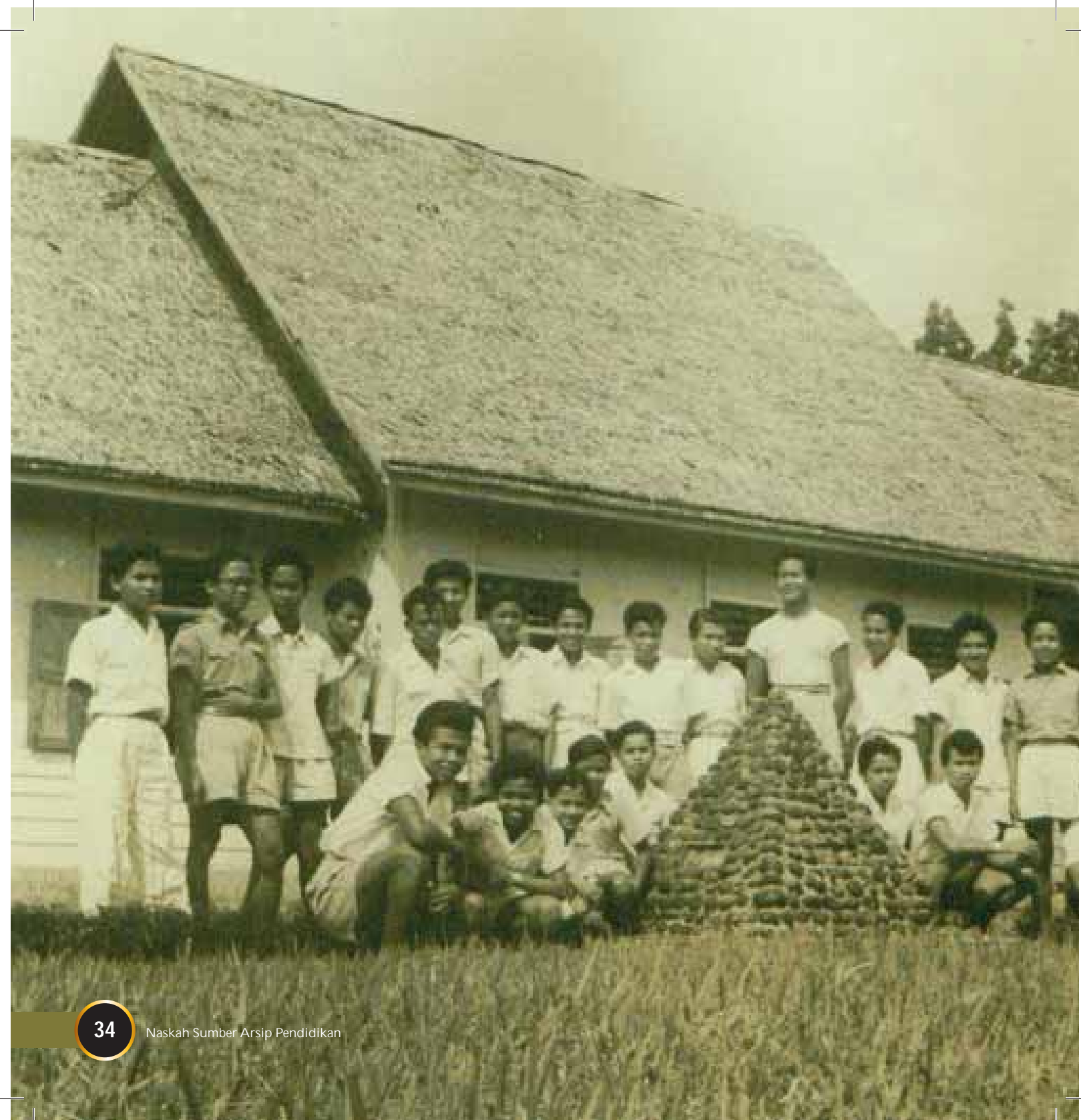
Pendidikan dalam rangka perjuangan kemerdekaan ditandai oleh munculnya gerakan pendidikan yang dipelopori oleh Muhammadiyah, Perguruan Taman Siswa, *Indische Nederlandsche School* (INS) Kayutanam, Pendidikan Ma'arif dan perguruan lain. Sekolah INS Kayutanam didirikan sebagai tanggapan terhadap pendidikan Belanda yang berlangsung saat itu oleh Muhammad Syafi'ei dinilai intelektualistik dengan mementingkan kecerdasan dan kurang memperhatikan bakat-bakat anak. Melalui INS yang didirikannya ia berusaha agar para siswa *tidak menjadi cendekiawan setengah matang yang angkuh tetapi menjadi pekerja cekatan yang rendah hati*. Di INS, para siswa dididik untuk bekerja teratur dan produktif agar dapat hidup mandiri. Para siswa mendapat pelajaran dalam berbagai bidang. Disamping dikembangkan atas dasar-dasar prinsip pedagogis, INS juga memupuk semangat nasionalisme di kalangan para siswanya. Hal ini tampak dari tujuan pendidikannya, yaitu agar siswa dapat berdiri sendiri dan tidak perlu mencari jabatan di kantor pemerintahan yang pada saat itu dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda. INS Kayutanam bertahan hingga masa pendudukan Jepang, dan pada masa perang kemerdekaan (tahun 1949) INS Kayutanam ditutup.

Muhammadiyah lahir dibawah pengaruh kebangkitan nasionalisme Bangsa. Mula-mula misi utama Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan agama, kemudian membuka dan menyelenggarakan pendidikan, baik sebagai sarana untuk anak mencerdaskan bangsa yang dibodohi oleh pemerintah Belanda maupun sebagai sarana menyebarkan syiar Islam.

MULO yang diberi subsidi oleh pemerintah Hindia Belanda, juga sebuah *Algemene Middelbare School* (AMS) yang mendapat bantuan dari para intelektual Indonesia yang beraliran nasional dan *Holland Inlandse Kweekschool*.



Peletakan batu pertama pembangunan gedung Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantoro, Bandung, 27 Juli 1952.
ANRI, Kempen 520727 FP 1

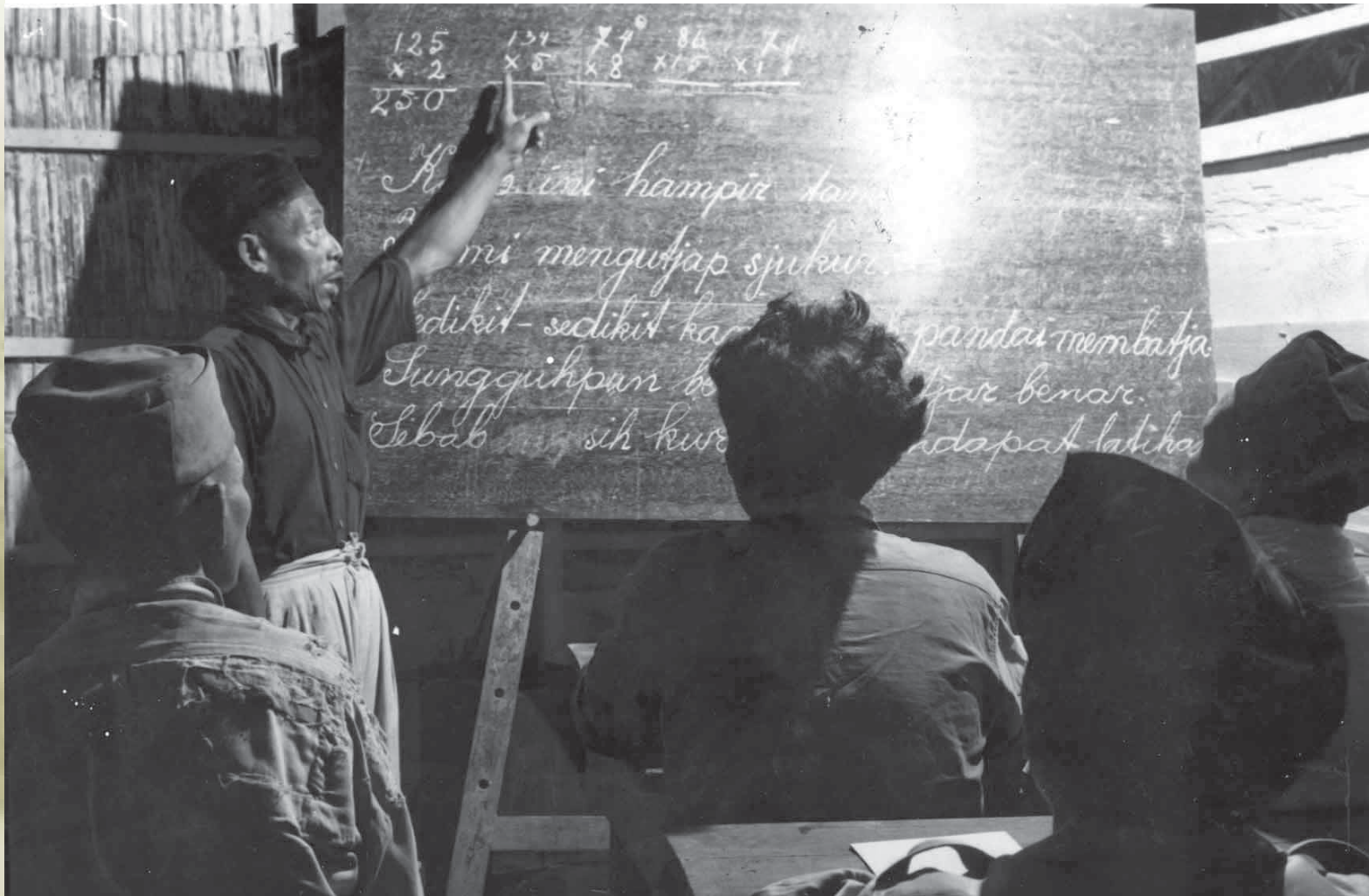





Para Siswa Sekolah Guru Bantu (SGB)
Perguruan partikulier Indonesia,
Indische Nederlandsche School (INS) di
Kayu Tanam, Sumatera Barat,
27 Desember 1954.
ANRI, Kempen 541227 CC 3



**PENDIDIKAN DALAM RANGKA
PEMBERANTASAN BUTA HURUF**



Pemberantasan buta huruf di Samarinda, Kalimantan Timur, 7 Mei 1949.
ANRI, Kempen RIS 90507 LL ii



Pemberantasan Buta Huruf di Negeri Saning Bakar yang terletak kira-kira 12 km dari Kota Solok, 1 April 1952.

ANRI, Kempen 520401





Pemberantasan Buta Huruf di Negeri Saning Bakar yang terletak kira-kira 12 km dari Kota Solok, 28 Februari 1952.

ANRI, Kempen 520401



Pemberantasan Buta Huruf di Negeri Saning Bakar yang terletak kira-kira 12 km dari Kota Solok, 10 Maret 1952.
ANRI, Kempen 520401



PERKEMBANGAN PENDIDIKAN



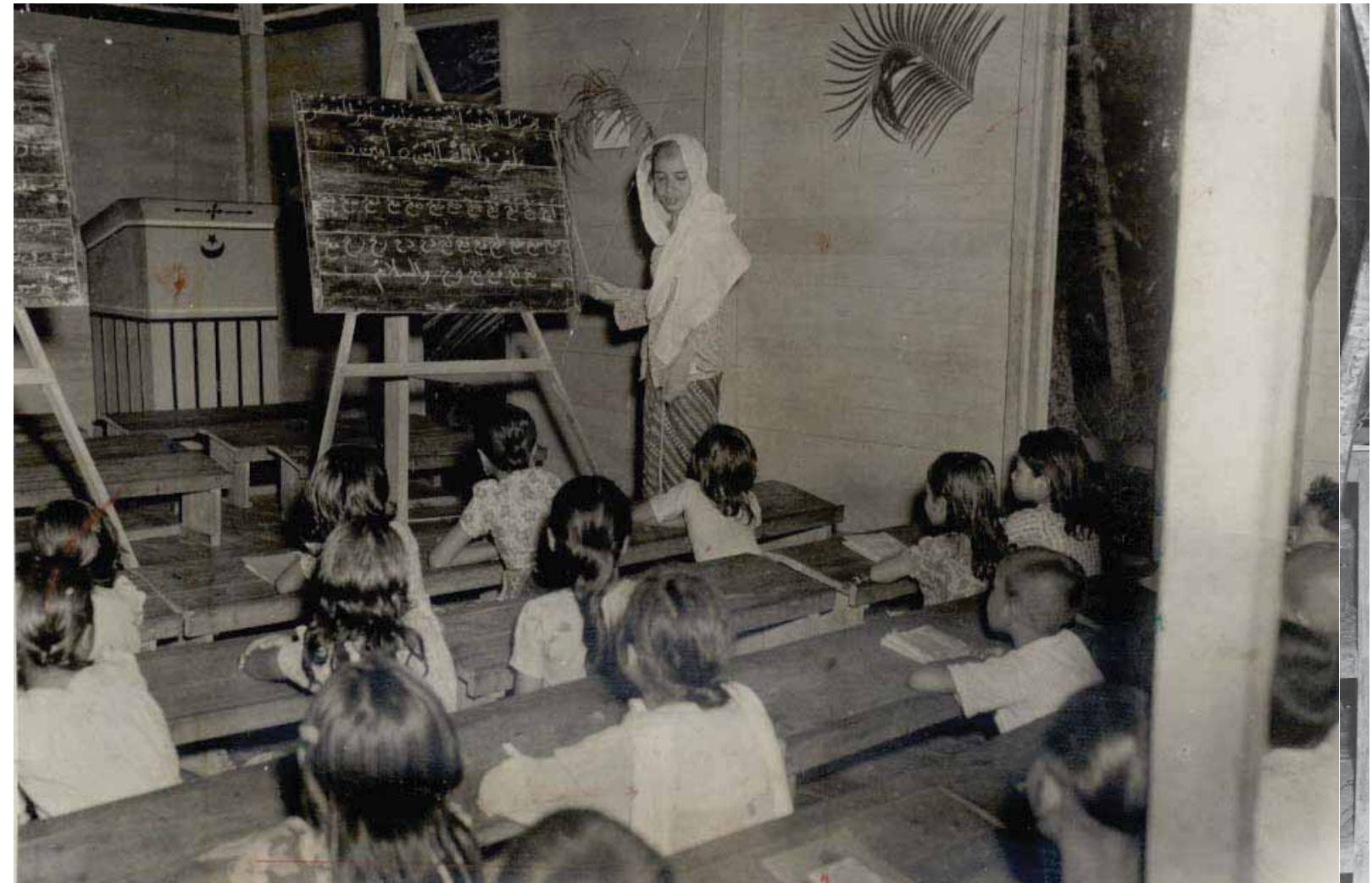
Upacara pembukaan Taman kanak-kanak Kirana di Singaraja, 1950
ANRI, Kempen 570/4



Kunjungan Presiden Soekarno ke sekolah teknik yang didirikan oleh *Bataafsche Petroleum Maaschaappij* (BPM- sekarang menjadi Pertamina), di Balikpapan, Kalimantan Timur, 1 September 1950.
ANRI, Kempen 501248



Kunjungan Menteri Agama di dampingi Gubernur Jawa Timur dan para Kyai di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, 28 Oktober 1951
ANRI, Kempen 950704 AV 2



Pemandangan dalam kelas di salah satu Madrasah, Sungai Besar, Kalimantan Barat, 1951.

ANRI, Kempen 510905 kk 14



Dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, Presiden Soekarno mengunjungi Sekolah Rakyat (sekarang SD) di Desa Pangkal Madiun, 21 September 1952
ANRI, Kempen 520921 HB 2-5



Pelajar-pelajar sekolah perikanan laut, berbaris di muka sekolah, Tegal, 1952.
ANRI, Kempen 521105 GB 1



Sekolah menengah untuk kaum wanita di Aceh Selatan, nampak para siswi sedang berbaris di lapangan, 26 Februari 1953.

ANRI, Kempen No. 530226 AA 9 (77)



Wakil Presiden Mohammad Hatta mengunjungi Sekolah Taman Kanak-kanak di Rarempa, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 20 April 1953.

ANRI, Kempen 530420 EE 75



Presiden Soekarno berbincang dengan murid-murid Sekolah Rakyat dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke Bone, Sulawesi Selatan, 9 Oktober 1953.
ANRI, Kempen 531009 RR 64



Murid Sekolah Rakyat sedang memainkan alat musik seruling Bambu di Sasana, Pulau Bacan, 17 Oktober 1954.

ANRI, Kempen 541017 V V 7 - 1





Pembukaan Gedung Asrama Ratnaningsih untuk paramahasiswa UGM, nampak Presiden Soekarno bersama-sama Menteri PP&K, Mr. M. Yamin melihat ruang asrama, 19 Desember 1954.

ANRI, Kempen 541219 GM 6



Presiden Soekarno dan rombongan mengunjungi Sekolah Kepandaian Putri dan Sekolah Guru B di Banjarmasin, 10 Desember 1955.

ANRI, Kempen 551210 LL 24



Siswa Penerbang Akademi Penerbangan Indonesia sedang bersiap mengadakan demonstrasi penerbangan, Curug, 3 Mei 1955.

ANRI, Kempen 550503 FE 12

VIKARIAT APOSTOLIK
MENDER - FLORES.

DIJAKARTA, 13 Juli 1955.

No. 536/X/55.

Lampiran: 3.

- Perihal: 1) Daerah Pertjajaan
Kewajiban beladjar.
2) S.G.S.2.
3) Kursus B.I.
4) Seminari.

K e p a d a :

J.M.Bapak Menteri P.P.dan K.
Mr.Mohd.Yamin
D J A K A R T A .

Bapak Menteri Jang Mulia.

Olah karena kami berpendapat, bahwa pada dewasa ini sebuah audiensi pada Bapak akan membahayakan djua kesibukan Bapak dalam penunjaian tugas jang mahaberat itu, maka niat kami untuk meminta audiensi dengan tulus hati kami batalkan.

Sungguhpun demikian kami berkejakinan, bahwa Bapak sudi dan sanggup mengatasi beberapa kesulitan jang kami hadapi.

Maka dari itu kami memberanikan diri untuk menjam-
paikan surat ini dengan hormat kepada Bapak, dengan peng-
harapan besar agar Bapak sudi menjurahkan perhatian se-
tjukupa atas hal2 jang tertjantung dibawah ini:

I. Ouna menjongsong tjital Pemerintah B.I. supaya dise-
luruh Nusantara didjalankan peraturan Kewajiban beladjar.
oleh Saudara Sekdjen P.P.dan K. telah diberi petunjuk
dan nasihat2 jang berguna kepada Sdr.Kepala Daerah Flores,
agar Saudara tersebut mau menjelidiki apakah ada kemungkinan
bahwa Nusa Flores didjadikan Daerah pertjajaan untuk pelak-
sanaan Kewajiban beladjar itu, pertjajaan mana akan dimulai
dalam tahun 1956 j.a.d. sekurang-kurangnya untuk beberapa
wilayah Swapradja.

Detail daripada penjelidikan itu, ialah bahwa dengan
suara bulat seluruh lapisan masyarakat Flores dengan segala
organisasi sangat menjetudji Daerahnja didjadikan Daerah
pertjajaan, hal mana Pemerintah telah kemukakan dalam surat-
nja No.4/1/425 tgl.24 Djuni 1954. Masih tetap Flores berharap
penetapan Kementerian perlu didjadikannya Daerah pertjajaan.

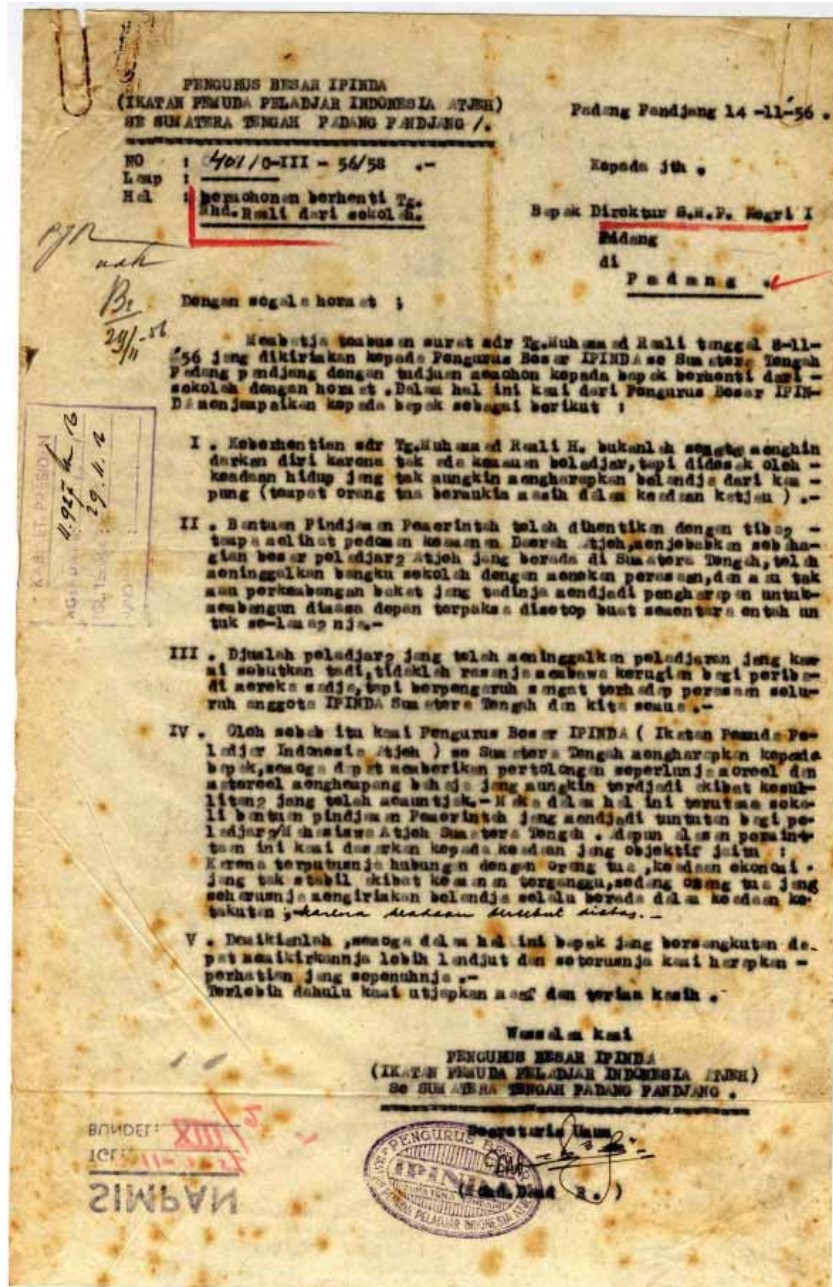
II. Dalam hubungan ini kami minta perhatian Bapak atas
Sekolah-Sekolah pendidikan Guru di Flores, jang masih tetap
kurang lanjut djalannya, dan alat-alat peladjaran jang
terlalu kurang persediaannya.
(Lampiran I.)

III. Dalam lingkungan inipun dapat dimintakan kepentingan
Kursus B-1 Ilmu Mendidik, jang telah berdjalan selama satu
tahun dan didukung oleh seluruh Masyarakat Flores.
Malapung harus diakui kebidjaksanaan surat Kepala bahagian
Kursus-Kursus Ditatan Pengajaran No.145/P ttg.16 Mei
1955 (Lampiran II.), namun kami memberanikan diri meminta
pengreman (dan subsidi) Kursus B-1 tersebut oleh karena:
1. Kursus itu kursus jang satu-satunya didalam Propinsi
Nusa Tenggara, dalam ilmu mendidik.
2. Sangat dirasa kebutuhan tenaga-tenaga jang tjakap dan
beridjasaah untuk memimpin Sekolah-Sekolah lanjutan pendidikan
guru.
3. Sekian banyak peladjar-peladjar jang mengikut Kursus ini
selama satu tahun dengan pengharapan teguh kursusnya akan
diresmikan.

Surat dari Vikariat
Apostolik kepada
Menteri PP dan K
tentang pernyataan
seluruh lapisan
masyarakat Flores
menyetujui agar Flores
dijadikan daerah
percobaan wajib
belajar, 13 Juli 1955.

ANRI, M. Yamin No. 312

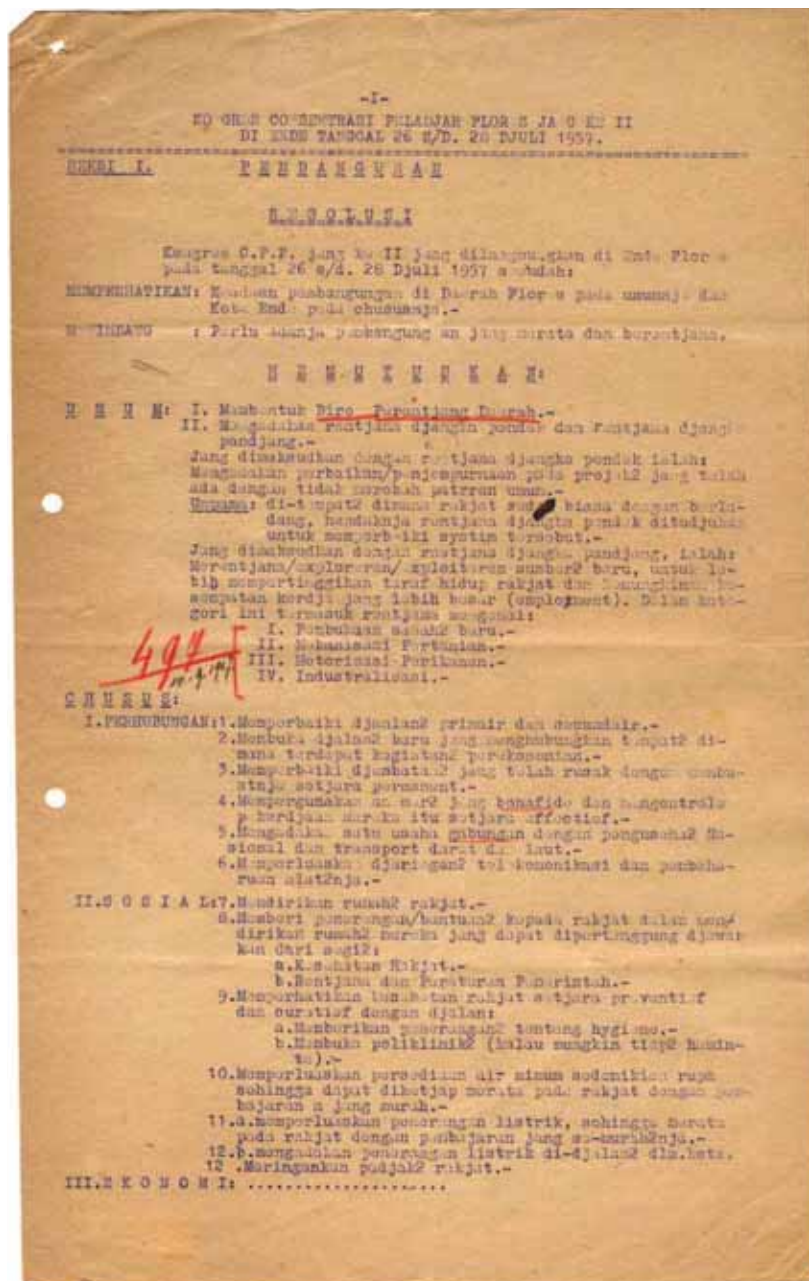
Surat dari Pengurus Besar Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Aceh (IPINDA) Padang Panjang se Sumatera Tengah kepada Direktur SMPN 1 Padang tentang permohonan berhenti Sdr Tg. Muhamad Ramli dari sekolah karena bantuan dari pemerintah dihentikan. 14 November 1956. ANRI, Kabinet Presiden No.1202





Pemberian Doktor Honoris Causa kepada Ki Hajar Dewantara oleh Presiden Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Sardjito, bertepatan dengan Dies Natalis ke VII Universitas Gadjah Mada, 19 Desember 1956
ANRI, Kempen 51

Bagian awal dari
Resolusi Kongres
Consentrasi Pelajar
Flores II di Ende tentang
pembentukan Biro
Perancang Daerah dan
merealisisasi pendidikan
dan kebudayaan di
segala sektor,
28 Juli 1957.
ANRI, Konstituante No.295



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1957
TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN DI BANDUNG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa hasrat dari rakyat Djawa-Barat pada umumnya dan masyarakat Bandung pada khususnya untuk mempunyai suatu universitas negeri adalah besar sekali, terbukti dengan adanya Panitia Pendirian Universitas Negeri di Bandung;
2. bahwa atas resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah pada tanggal 19 Desember 1956 menyatakan dihadapan Dewan tersebut kesediaannya untuk mendirikan suatu universitas negeri di Bandung;
3. bahwa persiapan-persiapan yang perlu yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Universitas Negeri di Bandung telah selesai, sehingga universitas itu dapat segera dibuka;
- Mengingat : a. Ordonansi Pengajaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389;
- b. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) pasal 6 dan 7 dan Undang-Undang No. 12 tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 38) tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah;
- c. Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 9) tentang Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan-peraturan Pemerintah :
1. No. 23 tahun 1949 tentang pendirian Universitas Gadjahmada;
 2. No. 57 tahun 1954 tentang pendirian Universitas Airlangga;
 3. No. 23 tahun 1956 tentang pendirian Universitas Hassan Uddin;
 4. No. 24 tahun 1956 tentang pendirian Universitas Andalas;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran & Kebudayaan :
1. tg. 16 Agustus 1954 No. 35693/Kab. tentang pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Bandung;
 2. tg. 6 Djuli 1956 No. 49719/8 tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 6 September 1957;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN DI BANDUNG, sebagai berikut:

Fasal 1.

Di Bandung didirikan suatu Universitas yang bernama : "UNIVERSITAS PADJADJARAN" dan yang terdiri atas :

- a. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat;
- b. Fakultas Ekonomi;

a dan b asalnja fakultas dari pada Jajasan Universitas Merdeka di Bandung, yang oleh pengurus telah diserahkan kepada Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Bandung, 18 September 1957. *ANRI, Sekkab, Peraturan Pemerintah No. 335*

Surat dari Prof. Mr. Djokomarsaid Tirtodiningrat (Presiden Universitas Hasanuddin) kepada Presiden Republik Indonesia mengenai Laporan Tahunan Universitas Hasanuddin, 15 Oktober 1957.

ANRI, Kabinet Presiden 1950-1959 No.1233

LAPORAN TAHUNAN DIUTJAPKAN PADA DISS NATALIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
TGL. 28 SEPTEMBER 1957
Oleh: PROF. MR. DJOKOMARSAID TIRTODININGRAT

P.J.M. Presiden
J.M. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
J.M. Menteri Kesehatan
J.M. Menteri Pelajaran
J.M. Menteri Antar Daerah
J.M. Menteri Veteran
J.M. Menteri Pengerahan Tenaga
Sdr. Wakil Ketua Dewan Nasional
Sdr. Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat
Sdr. Ketua Dewan Kurator Universitas Gadjah Mada
Sdr.2 Presiden Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Air-
langga, Andalas dan Ketua Presidium Universitas
Pajadjaran
Sdr.2 Ketua Fakultas Universitas Hasanuddin
Sdr.2 Guru Besar dan Dosen lainnya
Sdr.2 Anggota Dewan Mahasiswa dan Mahasiswa lainnya,
dan semua hadirin yang berkenan mengikuti perayaan Dies
Natalis Universitas Hasanuddin I ini,

Hadirin yang mulia,

Untuk pertama kali berdiri dihadapan para hadirin yang mulia ini, maka kiranya baik, sebagai pendahuluan laporan kami, djika kita menengok kebelakang dan melukiskan sekedar riwayat berdirinya Universitas Hasanuddin.

Dengan keputusan Luitenant Gouverneur General tgl. 19 Djuli 1947 No. 7 Stbl. 1947: 127 di Kota ini didirikan sebuah LEERGANG TOT OPLEIDING VAN ONDERWIJSBEVOEGHENEN, karena dirasakan kebutuhan besar bagi sekolah2 lanjut akan tenaga guru yang mempunyai pendidikan akademis dalam mata2 pelajaran ekonomi dan tata-buku. Leergang ini dimungkinkan oleh Hooger Onderwijs Ordonnantie tahun 1946 pasal 38 yang menentukan, bahwa gouverneur general dapat menghubungkan, setelah memperoleh saran dari Dewan Kurator dan Fakultas yang bersangkutan, pada Universitas Indonesia sebuah leergang atau lebih guna pendidikan guru atau pegawai yang mempunyai salah satu kejuruan. Kiranya dalam hal ini dipikirkan bahwa leergang yang didirikan itu, dihubungkan dengan Fakultas yang sudah ada

Akan tetapi

nsf.10,7/59.



PIDATO P.J.M. PRESIDEN PADA UPATJARA PEMBUKAAN
KOTA PELAJAR DARUSSALAM PADA TANGGAL 2 SEPTEMBER 1959
DI KOETARADJA.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Mardakat

Saudara-Saudara sekalian. Sebagai tadi telah diucapkan didalam amanat tertulis saja, maka terjatalah kegenairan hati saja, sjukur saja kehadiran Allah Subhana wata'Allah, bahwa pada ini hari 2 September 1959 dengan resmi dapat dibuka Darussalam. Darussalam sebagai hasil, sebagai pentjetusan daripada tekad, tekad yang bulat untuk melaksanakan tjita-tjita yang terkandung dalam hati-tjita rakjat Indonesia umumnya rakjat Atjeh khususnya, berpuluh-puluh tahun, tjita-tjita yang tersiapal didalam proklamasi 17 Agustus 1945 mendirikan satu negara Republik Indonesia yang besar dan kuat berwilayah kekuasaan dari Sabrang swapai Merauke dengan didalamnja satu masyarakat yang adil dan makmur.

Maka pembukaan Darussalam adalah salah satu langkah, salah satu tindakan untuk melaksanakan tjita-tjita itu dan sebagai tadi saja kata-kata, Darussalam ini adalah satu hasil pentjetusan daripada tekad yang bulat, tekad yang kerna laksana badja daripada Atjeh, daripada seluruh rakjat Atjeh, daripada kerjasama antara rakjat Atjeh dengan pemimpin-pemimpinnya. Ja Saudara-Saudara, tidak ada satu bangsa yang dapat menemahi tjita-tjita besarnya tanpa pada beberapa ketika didalam hidupnya mengambil keputusan-keputusan yang bulat membulatkan dia punja tekad, tekad untuk menentang, mengalahkan, menegkahi segala rintangan. Beberapa kali didalam hidup bangsa kita ini telah membulatkan tekad kita, beberapa kali kita menghadapi rintangan-rintangan. Beberapa kali melawan kita menerima pukulan-pukulan yang hebat. Tetapi sebagai berulang-ulang saja kata-kata, tiap-tiap rintangan kita atasi, tiap-tiap pukulan kita pukul kembali.

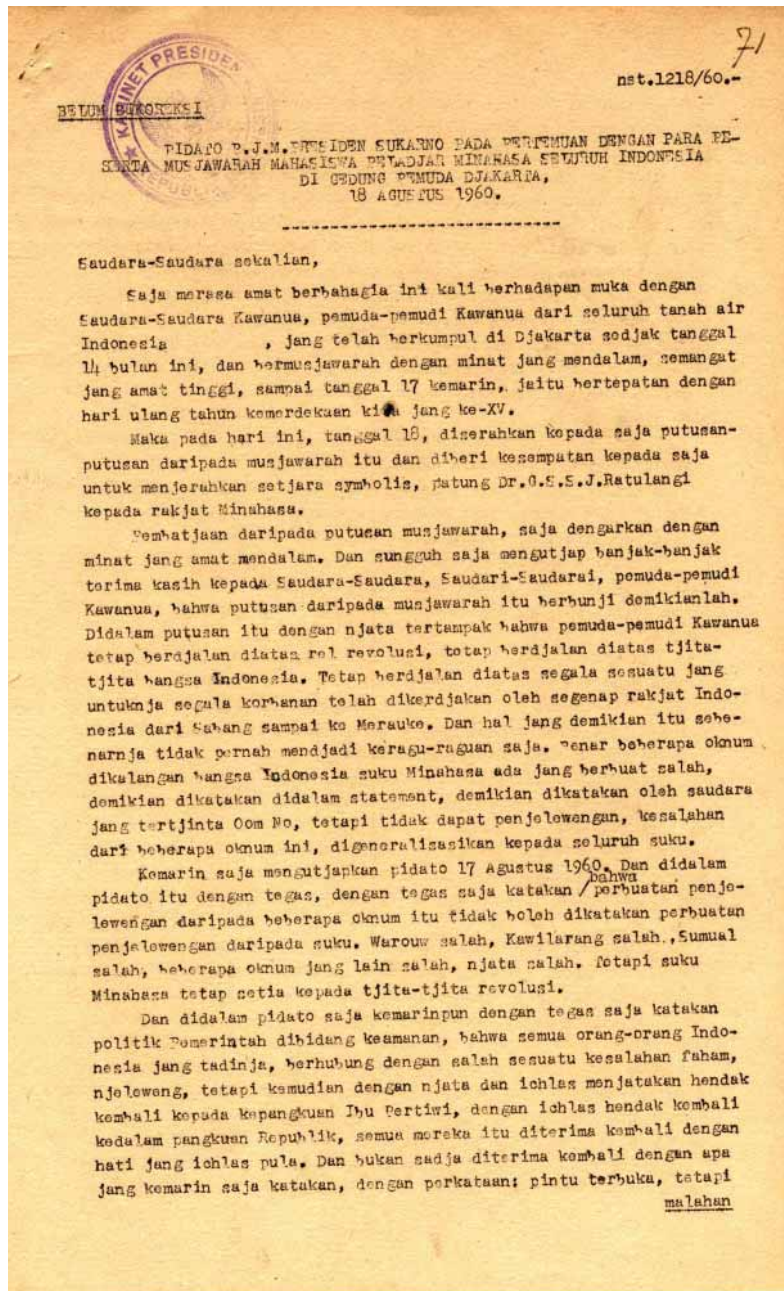
Sebagai yang sudah saja dikatakan didalam pidato saja dimuka Dewan Perwakilan Rakjat beberapa minggu yang lalu maka djasa kita yang terbesar, dalam bahasa Inggrisnja "achievement" kita yang terbesar didalam revolusi kita ini ialah bahwa kita tetap berdiri kendati kita mendapat pukulan-pukulan yang hebat. Didalam zaman Belanda kita mendapat pukulan-pukulan yang hebat. Pemimpin-pemimpin kita, djuga pemimpin-pemimpin Atjeh menerima pukulan-pukulan yang hebat tetapi selalu kita atasi dengan keteguhan semangat, dengan api yang menjala-njala didalam kita punja dada.

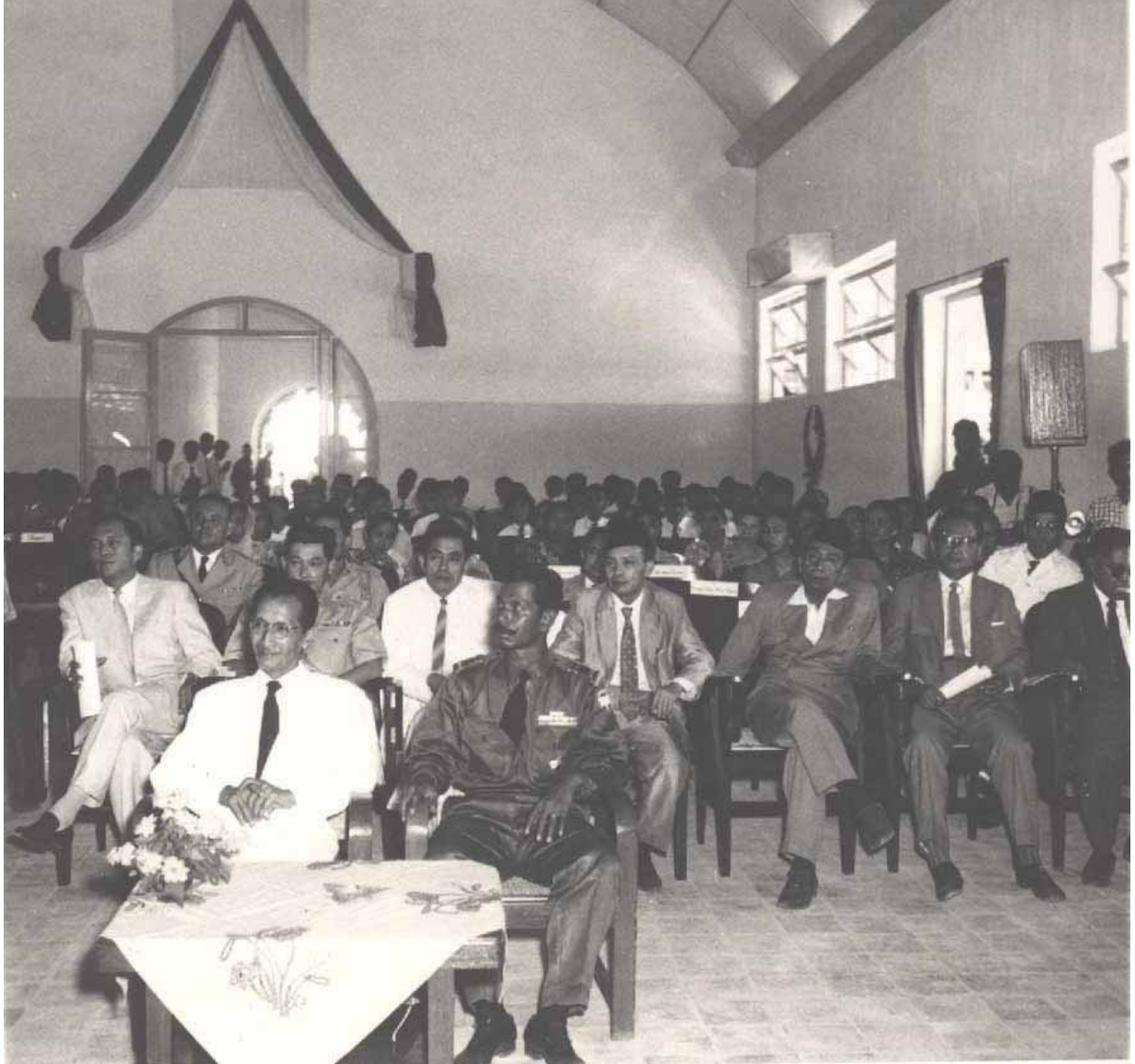
Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945 kita membulatkan sekali lagi tekad kita, tekad yang meskipun kita mengetahui bahwa kita akan menghadapi rintangan-rintangan yang maha besar, - lebih besar daripada gunung Salawati dihadapan kita Saudara-Saudara - teh kita memproklamlirkan kemerdekaan kita.

Didalam

Pidato Presiden Soekarno
pada pembukaan Fakultas
Ekonomi Universitas
Darussalam, Koetaradja,
2 September 1959.
ANRI, Pidato Presiden No. 104

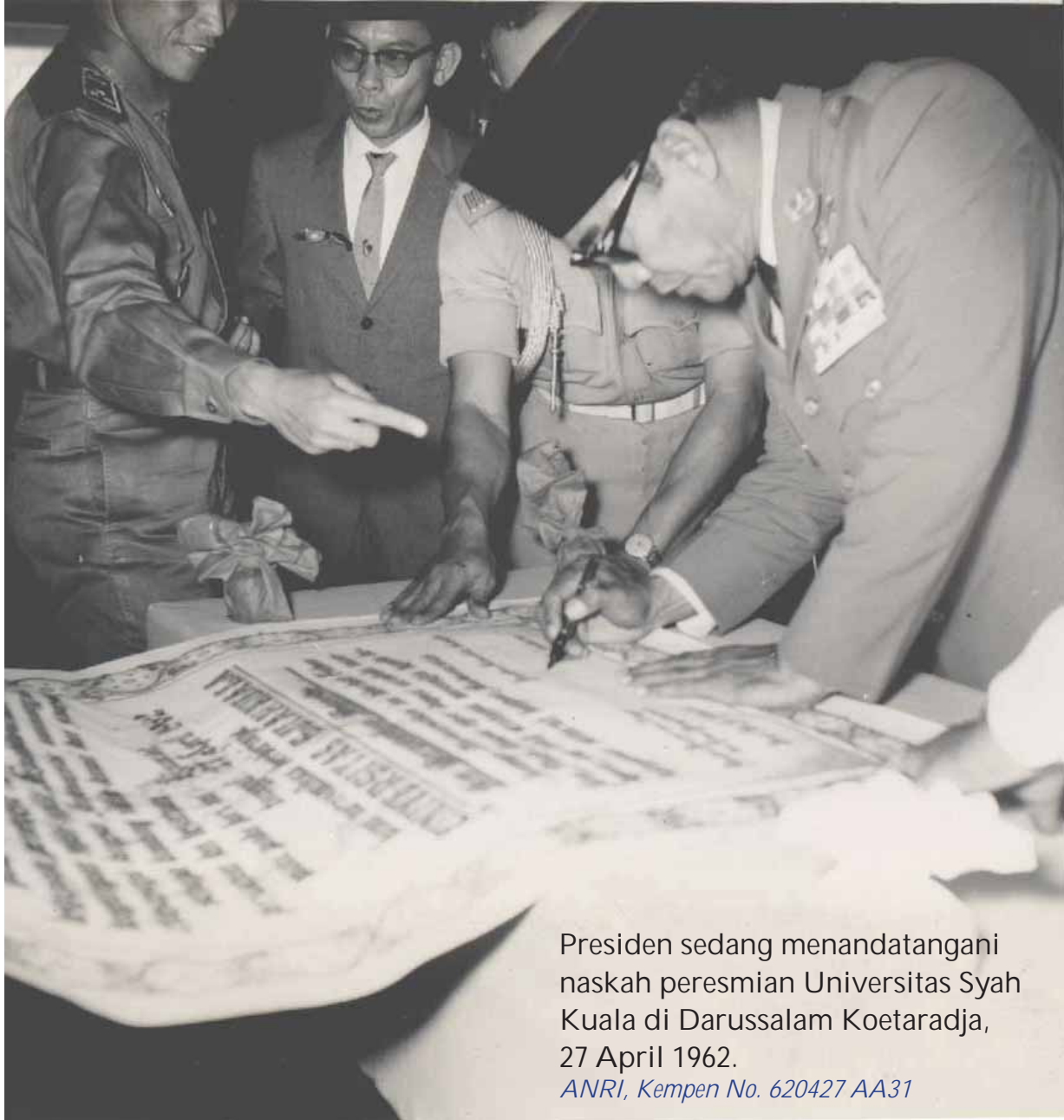
Pidato Presiden Soekarno pada pertemuan dengan parapeserta Musyawarah Mahasiswa Pelajar Minahasa Seluruh Indonesia, 18 Agustus 1960.
ANRI, Pidato Presiden No. 207





Pembukaan Fakultas Ekonomi di Universitas Syah Kuala, Darussalam Koetaradja,
2 September 1959.

ANRI, Kempen No. 590902 AA 1-8



Presiden sedang menandatangani naskah peresmian Universitas Syah Kuala di Darussalam Koetaradja, 27 April 1962.

ANRI, Kempen No. 620427 AA31



Panglima Operasi Mandala
Mayor Jenderal Soeharto
sedang menandatangani Naskah
Peresmian Universitas Muslimin di
Makassar, Sulawesi Selatan,
10 November 1962.

ANRI, Deppen RI, 62-7336



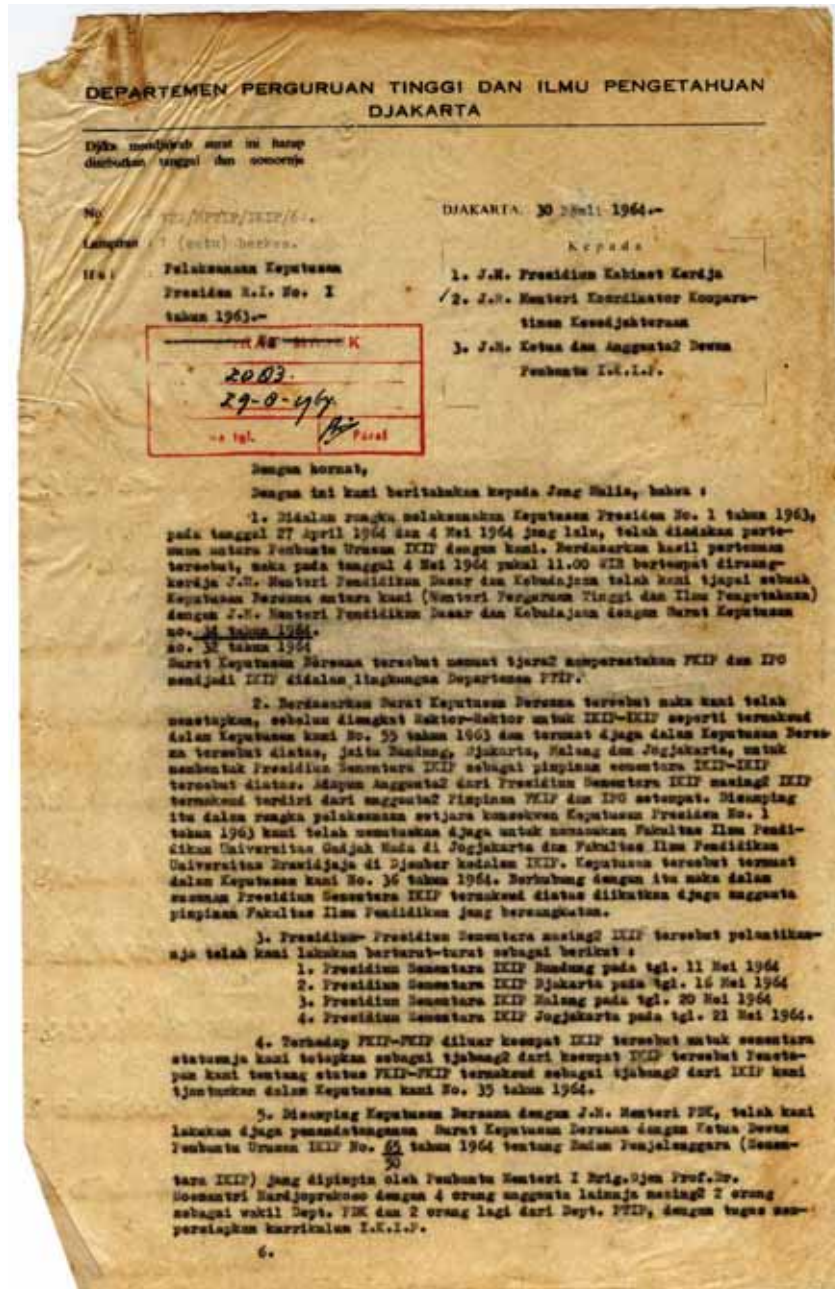
Para Siswa sedang melakukan praktek di Laboratorium Sekolah, Sorong, 1963.
ANRI, Kempen 63-9478

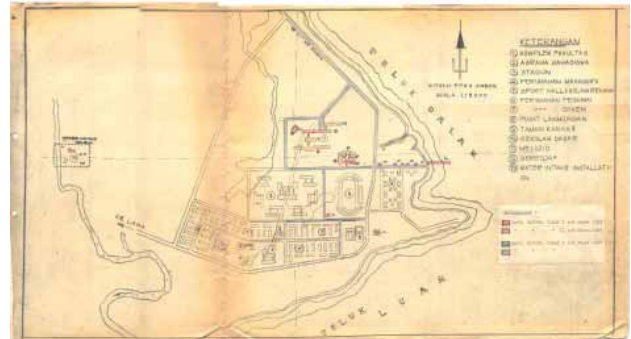
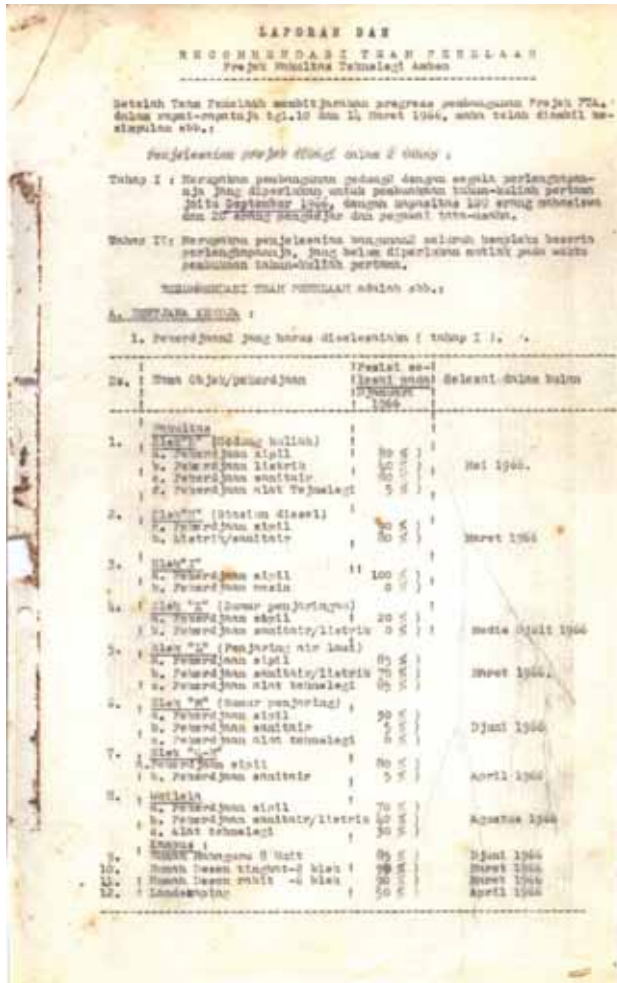


Pemberian pelajaran sebagai salah satu peningkatan mutu pendidikan masyarakat di wilayah Irian Barat, 1963.

ANRI, Kempen Wilayah Irian Jaya 63-9406

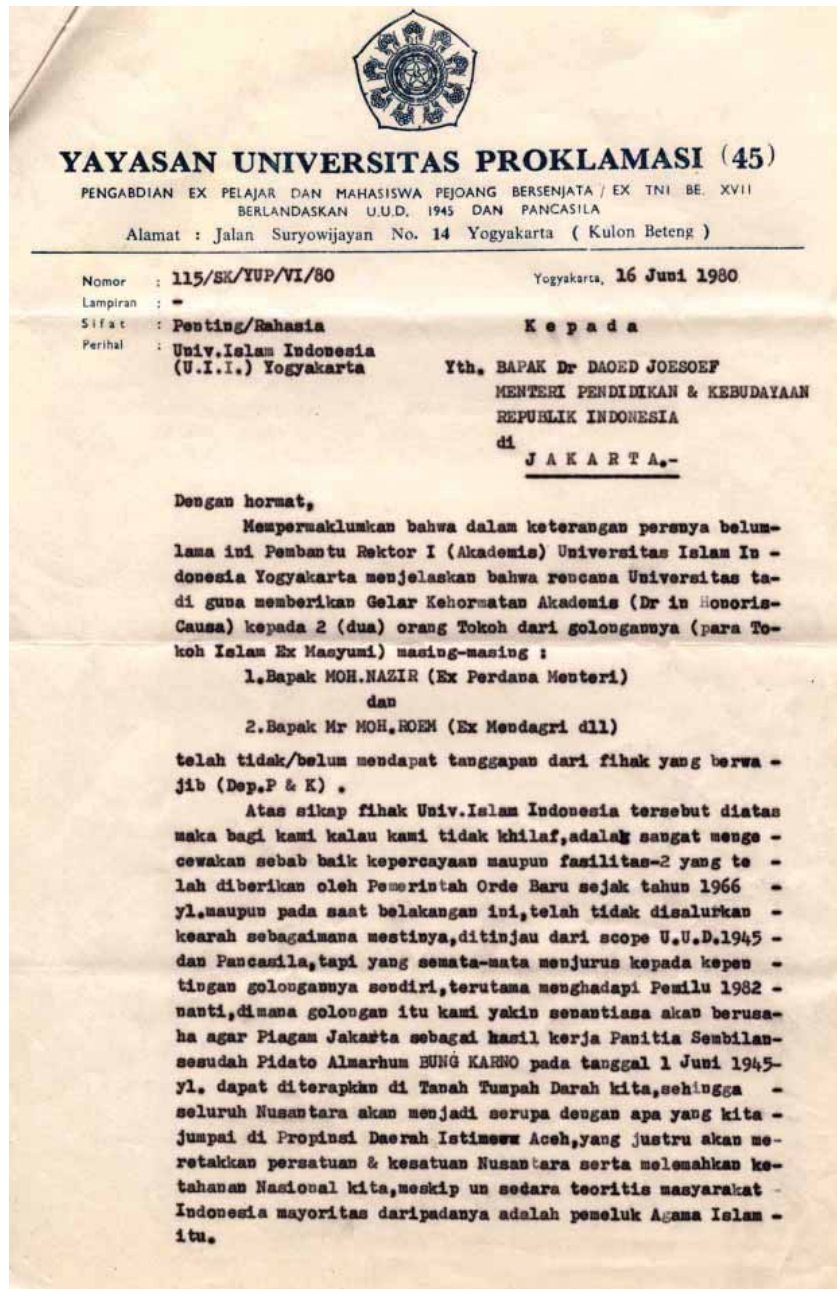
Surat dari Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Jakarta kepada J.M. Menteri Koordinator Kesejahteraan tentang penyatuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Institut Pendidikan Guru (IPG) menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) dalam lingkungan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), 30 Juli 1964
ANRI, HUBRA No. 886





Laporan dan rekomendasi Team Penelaah Pembangunan Proyek Fakultas Teknik Ambon tanggal 11-20 April 1966, dengan lampiran berupa denah.
ANRI, Ekubang 505

Pemberian gelar kehormatan akademis Doktor Honoris Causadari Yayasan Universitas Proklamasi (45) kepada dua orang tokoh Islam Mr. Moh. Natsir dan Mr. Moh. Roem, 16 Juni 1980. *ANRI, Setwapres Adam Malik No. 652*



PERSTARIKATAN : GERAKAN DA'WAH ISLAM
M U H A M M A D I Y A H
Didirikan pada : 8 Dzulhijjah 1330 H
18 Nopember 1912 H

**SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH WILAYAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Nomor : A-1/01.E/PW/1981.

tentang : **Pendirian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**

Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta setelah :

- Memperhatikan** :
1. Kesimpulan pembicaraan dalam Sidang Pleno PMW DIY pada tg. 14-12-1980 tentang **Pendirian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**
 2. Kesimpulan Pembicaraan dalam Sidang Bersama PMW DIY & PP - Muhammadiyah Yogyakarta pada tg. 16-12-1980.
 3. Kesimpulan pembicaraan dalam Sidang Bersama PMW DIY & Kelompok Cendekiawan dan Dersawan Muhammadiyah Yogyakarta yang dipimpin oleh Sdr. Drs. H. Bakri Syahid. pada tanggal 02-01-1981.
 4. Keputusan Sidang Pleno PMW DIY pada tanggal.11-02-1981.
- Mengingat** :
1. Keputusan Musyawarah Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tg. 23 s/d 25 Januari 1981 di Yogyakarta tentang **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**
 2. **Q'idah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bab. III Pasal. 7 .**
 3. Keputusan Sidang Tamwir Muhammadiyah Tahun 1980 di Yogyakarta tentang **Badan Pembinaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah**
 4. **Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 4.**
- Menimbang** :
1. Bahwa dipandang perlu segera mendirikan **Universitas Muhammadiyah** di Yogyakarta.
 2. Pendirian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta telah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memenuhi **hajat Muhammadiyah.**
 - b. Sesuai dengan **hajat Masyarakat.**
 - c. Memiliki **komampuan dalam penyelenggaraan dan pembinaannya.**
- Berdasarkan** : Kesimpulan pembicaraan dalam Sidang Pleno PMW DIY pada tanggal 20 Rab.akhir 1401 H / 25 Februari 1981 H.

MEMUTUSKAN :

1. Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta mendirikan **Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**, terhitung mulai tanggal : 24 Rabi'ul akhir 1401 H / 1 Maret 1981.
2. Untuk pertama kali pada tahun ajaran 1981/1982 dibuka **Fakultas Teknik jurusan teknik sipil, Psikologi, Hukum, Ekonomi, Sosial politik dan Kedokteran.**

Demikianlah Surat Keputusan ini di buat untuk dimaklumi bagi masing - masing yang berkepentingan.

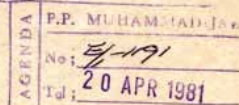
Yogyakarta, 20 Jumadil awal 1401 H.
1981 H.

Pimpinan Muhammadiyah Wilayah
Daerah Istimewa Yogyakarta

Sekretaris,
(M. Muchlas B. Sc)-.

Disampaikan kepada:
Yth. Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta.

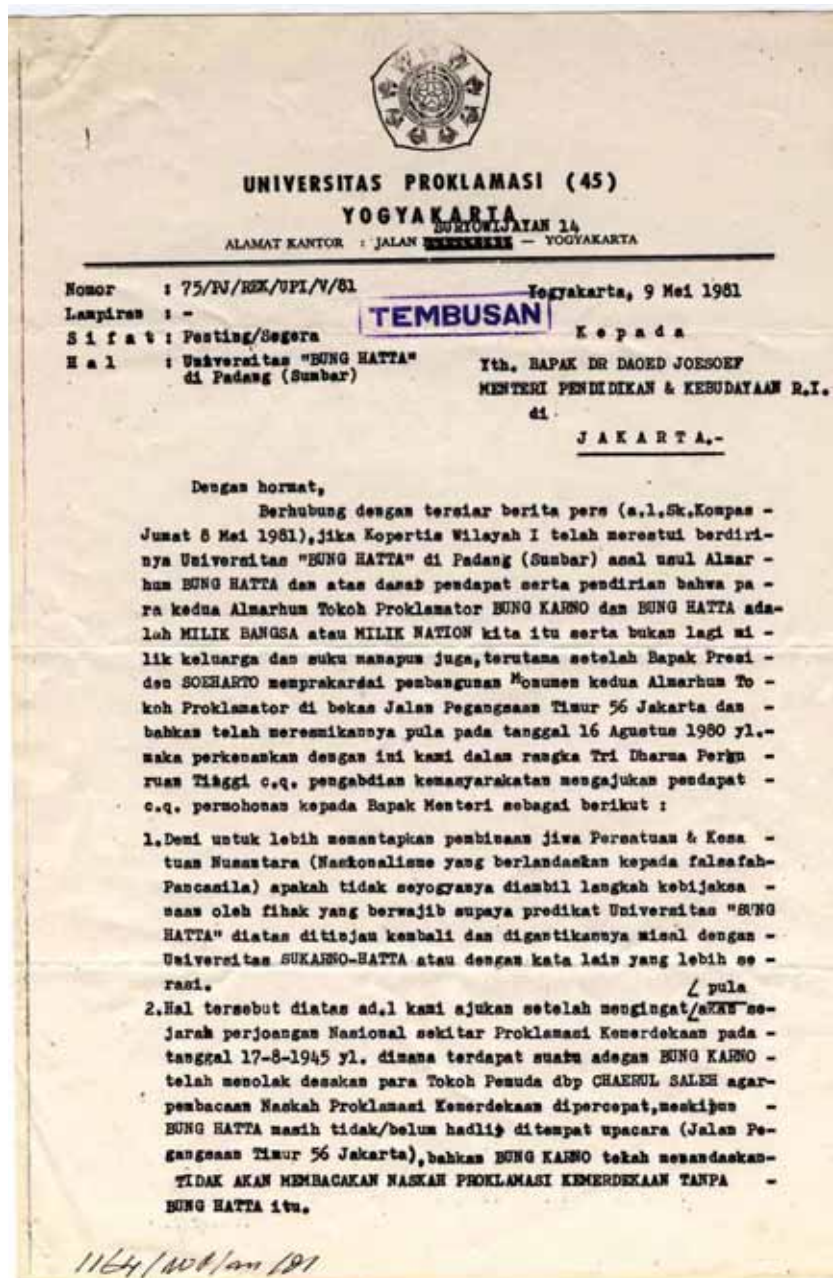
- Tembusan dikirim kepada Yth:
1. PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Jakarta.
 2. PP Muhammadiyah Majelis PP & K Jakarta.
 3. PMW Majelis PP & K DIY untuk menjadi salinan.



Surat Keputusan Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor A-1/01.E/PW/1981 mengenai pendirian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 26 Maret 1981. ANRI, Muhammadiyah No.4053

Surat dari Pj. Rektor Universitas Proklamasi (45) Jogjakarta kepada DR. Daod Joesoef Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang permohonan penggunaan nama Universitas Bung Hatta menjadi Universitas Soekarno-Hatta, 9 Mei 1981.

ANRI, Setwapres Adam Malik No. 670





GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

Nomor : 745/V/1986

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI PRO-
PINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- bahwa setelah diadakan penyerahan tanggung jawab - serta wewenang pelaksanaan pembangunan gedung Seko- lah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di - Sulawesi Selatan dari Departemen Pendidikan dan - Kebudayaan kepada Departemen Pekerjaan Umum belum- berjalan secara lancar sebagaimana yang diharapkan, maka perlu dilakukan koordinasi secara mantap agar pelaksanaan proyek di lapangan dapat berjalan lan- car.
 - bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan pro- yek sangat kompleks dan berbeda-beda antar Dati II maka perlu penanganan secara terpadu dan terkoor- dinasi.
 - bahwa berhubung hal-hal tersebut diatas dipandang- perlu membentuk tim Koordinasi Pelaksanaan Pempa- ngunan Gedung Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Propinsi Dati I Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
- Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok- Pemerintahan di Daerah (LN. tahun 1974 No.38, TLN.- No.3037);
 - Undang-undang No.1 tahun 1986 tentang Anggaran Pem- bangunan Belanja Negara;
 - Keputusan Presiden No.29 tahun 1984 tentang Pedo- man Pelaksanaan Anggaran Pembangunan Belanja Negara;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 tahun 1982 ten- tang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengenda- lian Pembangunan di Daerah;
 - Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pekerjaan Umum No.0253/M/1985 dan 298/ KPTS/1985 tanggal 6 Juni 1985;
 - Keputusan Bersama Dirjen Pendidikan Dasar dan Mene- ngah Depdikbud dan Dirjen Cipta Karya Departemen - Pekerjaan Umum No.117/C/Kep/R 85 tanggal 19 Juni - 109/KPTS/CK/1985 1985.

Memperhatikan: Hasil rapat konsultasi antara Gubernur KDH Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Kepala Kanwil Depdikbud-Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 27 Mei 1986 ber- tempat di Gubernuran Ujung Pandang.

MEMUTUSKAN

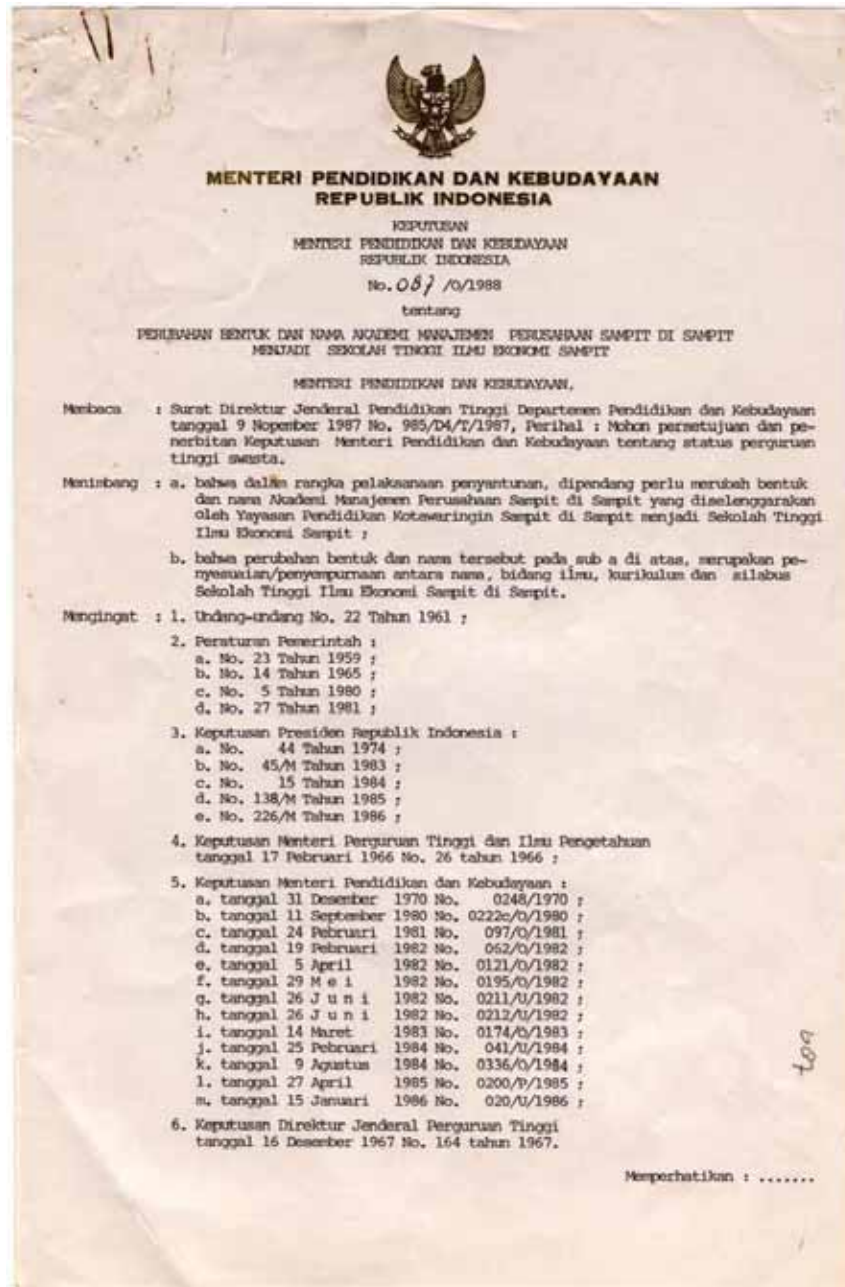
1881/W/Dan/86

Bagian awal Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 745/V/1986 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, 31 Mei 1986.

ANRI, Sekretariat Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma No. 446

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 087/0/1988 tentang Perubahan Bentuk dan Nama Akademi Manajemen Perusahaan Sampit menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sampit,

15/02/1988.
ANRI, Departemen Pendidikan Nasional 1988





MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0127/0/1990

tentang

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR KEPADA FAKULTAS/JURUSAN/PROGRAM
STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN PALANGKARAYA DI PALANGKARAYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Desember 1989 No. 4635/D/T/1989.

Menimbang : a. dalam rangka pembinaan perguruan tinggi swasta perlu mengadakan penilaian terhadap fakultas/jurusan/program studi di lingkungan Universitas Kristen Palangkaraya di Palangkaraya untuk pemberian status Terdaftar sesuai dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1989 ;
b. bahwa berdasarkan data dan informasi dari Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII di Surabaya, perguruan tinggi swasta/unit perguruan tinggi swasta tersebut pada sub a sudah memenuhi syarat untuk diberikan status Terdaftar untuk Program S1.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah :
a. No. 23 Tahun 1959 ;
b. No. 14 Tahun 1965 ;
c. No. 5 Tahun 1980 ;
d. No. 27 Tahun 1981 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. No. 44 Tahun 1974 ;
b. No. 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1989 ;
c. No. 226/M Tahun 1986 ;
d. No. 64/M Tahun 1988 ;
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tanggal 17 Pebruari 1966 No. 26 Tahun 1966 ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 31 Desember 1970 No. 0248/1970 ;
b. tanggal 11 September 1980 No. 0222-c/0/1980 ;
c. tanggal 24 Pebruari 1981 No. 097/0/1981 ;
d. tanggal 19 Pebruari 1982 No. 062/0/1982 ;
e. tanggal 5 April 1982 No. 0121/0/1982 ;
f. tanggal 29 Mei 1982 No. 0193/0/1982 ;
g. tanggal 26 Juni 1982 No. 0211/U/1982 ;
h. tanggal 26 Juni 1982 No. 0212/U/1982 ;
i. tanggal 14 Maret 1983 No. 0174/0/1983 ;
j. tanggal 25 Pebruari 1984 No. 041/U/1984 ;
k. tanggal 9 Agustus 1984 No. 0336/0/1984 ;
l. tanggal 15 Januari 1986 No. 020/U/1986 ;
6. Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi tanggal 16 Desember 1967 No. 164 Tahun 1967.

Memperhatikan :

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0127/0/1990 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan Universitas Kristen Palangka Raya, 09/03/1990 .
ANRI, Departemen Pendidikan Nasional 1990

Sumber selanjutnya:

1. Laporan kondisi pendidikan/pengajaran di Sekolah Dasar Pemerintah Negeri di Surakarta, 1865. ANRI, Hoofd Commisse van Onderwijs No. 2/6.B
2. Surat dari Hazekiel Nuzah guru di Karakelang kepada Residen Manado yang mengeluh karena sudah diangkat menjadi guru sejak April 1868 tetapi belum mendapatkan gaji, Mei 1868. ANRI, Manado No. 11
3. Persetujuan perubahan pasal 10, 12, 15 dan 17 dari "Perkumpulan Kartini di Hindia-Belanda" yang berkedudukan di Semarang. Pembentukan perkumpulan ini disetujui menurut Surat Keputusan tanggal 28 Maret 1913 No. 60. ANRI, Algemene Secretarie Besluit GG 6 April 1920 No. 45
4. Amanat tertulis Presiden RI kepada para pelajar di Prabumulih, dalam rangka kunjungan Presiden ke Sumatera Selatan, 16 November 1952. ANRI, Kempen 521117 DD15
5. Resolusi rapat anggota IMT (Ikatan Mahasiswa Tapanuli) di Tarutung agar Universitas Dharma Bakti Tarutung dijadikan universitas negeri, 27 Februari 1957. ANRI, Kabinet Presiden No. 1211
6. Surat dari Kongres Mahasiswa/pelajar se Nusa Tenggara Timur kepada Presiden RI tentang pengiriman hasil-hasil kongres mahasiswa dan pelajar se-Nusa Tenggara Timur, 15 Agustus 1957. ANRI, Kabinet Presiden RI 1220
7. Pidato Presiden Soekarno pada pembukaan Perguruan Tinggi Udayana di Bali yang memberikan pujian kepada masyarakat Bali sebagai masyarakat yang sangat toleran yang hidup dalam suasana persatuan dan dengan berdirinya Udayana ini diharapkan tercipta manusia yang dapat menjadi pewahyu rakyat Indonesia, 29 September 1958. ANRI, Pidato Presiden No. 023
8. Pidato Presiden Soekarno pada peresmian pembukaan ITB di Bandung, 2 Maret 1959. ANRI, Pidato Presiden No. 64
9. Sambutan Roeslan Abdulgani selaku wakil Ketua Badan Pembantu IKIP di Bandung tentang perlunya mahasiswa dalam persoalan revolusi, 17 Maret 1964. ANRI, Roeslan Abdulgani No. 434
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 141 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Palangka Raya, 04/11/1963. ANRI, Departemen Pendidikan Nasional 1963
11. Peluncuran roket "Pramuka Sriwijaya I" di Km 19, Palembang, Sumatera Selatan, 16 Mei 1965. ANRI, Kempen 65-0516-1 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0277/0/1975 tentang Pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di Palangka Raya, Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, 27/11/1975. ANRI, Departemen Pendidikan Nasional 1975

BIBLIOGRAFI

1. *Aardrijkskundig en Statistisch Woordenboek Nederlandsch-Indie*, 1869; Eerste –Vierde Deel, PN van Kamp- Amsterdam, 1869
2. *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie*, 1921; Eerste Gedeelte; Landsdrukkerij- Batavia, 1921
3. *Regeerings Almanak voor Nederlandsch-Indie*, 1939; Eerste Gedeelte; Landsdrukkerij- Batavia, 1939
4. Early Modern History – Indonesian Heritage, Anthony Reid.ed., Vol.3 – Archipelago Press, Singapore repr.1999, 2001.
5. Ricklefs, MC, *Sejarah Indonesia Modern, 1200-2001*; Cet.III – PT Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2007
6. Sejarah kesehatan nasional Indonesia, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2009
7. Melestarikan Memory Kolektif Bangsa, Arsip Nasional RI – Jakarta, 2012.
8. Pendidikan di Indonesia (https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_di_Indonesia)
9. PENGANTAR PENDIDIKAN : sejarah pendidikan di Indonesia (<https://gatotardiansah.wordpress.com/pengantar-pendidikansejarah-pendidikan-di-inonesia>)
10. Sejarah Kesehatan Pendidikan di Indonesia(<https://haedarakib.files.wordpress.com/2012/01/sejarah-pendidikan-di-indonesia.pdf>)
11. *Creative Schools: Revolutionig Education from the Ground Up*. Ken Robinson and Lou Aronica, Allen Lane 2015